

**KEBIJAKAN PRESIDEN NICOLAS MADURO  
DALAM MENGATASI KRISIS EKONOMI  
DI VENEZUELA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh :  
Selvi Adrianti  
(07041181621004)**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2020**

**KEBIJAKAN PRESIDEN NICOLAS MADURO  
DALAM MENGATASI KRISIS EKONOMI  
DI VENEZUELA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh :  
Selvi Adrianti  
(07041181621004)**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2020**

# HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

## KEBIJAKAN PRESIDEN NICOLAS MADURO DALAM MENGATASI KRISIS EKONOMI DI VENEZUELA

### SKRIPSI

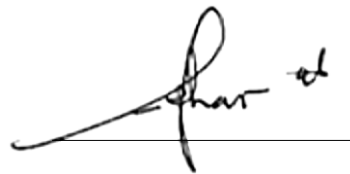
Disusun oleh:

**SELVI ADRIANTI**  
**07041181621004**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 22 Oktober 2020

Pembimbing I

DR. H. AZHAR, SH., MSC., LL.M., LL.D  
NIP 196504271989031003



Pembimbing II

GUNAWAN LESTARI ELAKE, S.IP., M.A  
NIP 198405182018031001



Mengetahui oleh,  
Ketua Program Studi,



DR. H. AZHAR, SH., MSC., LL.M., LL.D  
NIP 196504271989031003

# HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

## KEBIJAKAN PRESIDEN NICOLAS MADURO DALAM MENGATASI KRISIS EKONOMI DI VENEZUELA

### SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 07 Desember 2020  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

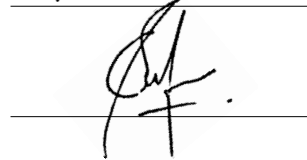
Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.  
Ketua



Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A  
Anggota



Ferdiansyah R, S.I.P., M.A  
Anggota



Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc  
Anggota



Indralaya, 07 Desember 2020

Mengesahkan,

Dekan.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si.  
NIP 19631106 199003 1 001

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selvi Adrianti

NIM : 07041181621004

Program Studi : S1 - Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN PRESIDEN NICOLAS MADURO DALAM MENGATASI KRISIS EKONOMI DI VENEZUELA“ ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 22 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan



Selvi Adrianti

NIM 07041181621004

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT. Tak pernah cukup rasa terima kasih atas cinta kasih, pengorbanan dan kesabaran. Tiada kata yang terindah yang dapat penulis tulis selain untaian terimakasih. Tulisan ini penulis persembahkan:

1. Kepada Allah SWT yang Maha Besar saya persembahkan rasa syukur yang tidak pernah habis kepada sang pencipta.
2. Kepada Ayah (Samhir) dan Ibu (Syahidah) tercinta, tersayang, motivator terbesar dalam hidup penulis yang tidak pernah lelah mendoakan, menyemangati serta menyayangi penulis dengan penuh keikhlasan, penulis mengucapkan terimakasih banyak atas semua pengorbanan dan kesabaran sehingga mengantarkan penulis sampai seperti ini dan tidak akan pernah cukup untuk membalas keringat dan air mata orang tua.
3. Kepada Kakak dan Keponakan (Yogi, Erin, Rafisqy dan Abizar) terima kasih atas semangat dan dukungan yang mereka berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir “skripsi” dengan lancar.
4. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas segala dukungan dan mendoakan serta memberikan semangat dalam kehidupan penulis.
5. Kepada almamater dan jurusan penulis persembahkan ucapan terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

## INTISARI

Venezuela sedang mengalami krisis ekonomi seperti hiperinflasi, dan kelangkaan bahan pokok membuat negara tersebut menjadi negara terbelakang di Amerika Latin karena kinerja perekonomian yang terpuruk. Hal ini terjadi akibat *mismanagement* (salah urus) selama fenomena *Boom Oil* (ledakan harga minyak), ketika Hugo Chavez menjabat atau masa saat harga minyak lebih dari \$100 per barrel, Venezuela menerima keuntungan yang cukup dari mengeksport minyak sehingga volume ekspor yang lebih rendah tidak membahayakan ekonominya. Namun saat Nicolas Maduro mulai menjabat sebagai Presiden Venezuela, terjadi pelemahan ekonomi di Venezuela seperti hiperinflasi, harga barang dan jasa yang meningkat, kenaikan tindakan kekerasan dan kriminal telah memicu rakyat Venezuela melakukan aksi protes. Tidak hanya kericuhan saja yang terjadi di Venezuela. Namun, tekanan dari berbagai pihak yang tidak puas dengan kinerja Maduro juga berdampak pada legitimasinya sebagai presiden.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana Presiden Nicolas Maduro tetap menerapkan kebijakan populis dalam menangani krisis ekonomi di Venezuela. Dilihat dari upaya yang dilakukan Presiden Maduro secara ekonomi tetap berpegang pada konsep negara kesejahteraannya dengan langkah-langkah yang dilakukan tetap berusaha menjalankan kebijakan populis sayap kiri yang berbasis *deficit spending* (pengeluaran lebih besar dari penerimaan) ditengah krisis ekonomi. Menurut teori populisme sayap kiri, karakter pemimpin dalam menjalankan pemerintah cenderung mengutamakan kesejahteraan bagi rakyatnya dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang sosialis dengan mendapatkan atau menggunakan kekuasaan yang dimilikinya.

Dalam tinjauan krisis ekonomi yang terjadi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam menghadapi krisis adalah dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung perindustrian Venezuela sebagai sumber pendapatan ekonomi, memberikan dukungan dari pemerintah terhadap tenaga kerja lokal dan menerapkan kebijakan pemerintah yang mendukung perekonomian negara untuk mengatasi krisis yang terjadi. Selain itu alasan Nicolas Maduro di saat terjadi krisis ekonomi, namun ia merespon masih tetap menjalankan kebijakan-kebijakan *deficit spending* seperti program program kesejahteraannya meliputi menaikkan upah pekerja minimum, meningkatkan lapangan pekerjaan hingga melakukan kerja sama luar negeri dikarenakan Nicolas Maduro ingin meningkatkan legitimasi kekuasaannya di Venezuela serta ingin menjaga identitas negara Venezuela sebagai negara bolivarian.

**Kata kunci: Krisis Ekonomi, Venezuela, Nicolas Maduro, Teori Populisme Sayap Kiri, Hiperinflasi, Bolivarian.**

## ABSTRACT

Currently, Venezuela has been strucking an economic crisis such as hyperinflation, and scarcity of basic commodities, made the country become underdevelop in Latin America due to its slumping economic performance. This occurred due to mismanagement during the Oil Boom phenomenon, when Hugo Chavez was the president or when the oil price was more than \$ 100 per barrel, Venezuela received sufficient profits from exporting oil itself, so that the volume of exports is lower which not influence the economy. However, when Nicolas Maduro took office as President of Venezuela, there was an economic downturn in Venezuela such as hyperinflation, rising prices for goods and services, increased violence and crimes that triggered the Venezuelan people to protest. It was not only chaos that occurred in Venezuela. However, the pressure from various parties who were dissatisfied with Maduro's performance also had an impact on his legitimacy as president.

This study aims to explain why and how President Nicolas Maduro continue to implement of the populist policies in facing the economic crisis in Venezuela. Economically, the efforts made by President Maduro to face the crisis are by sticking to the concept of his welfare state while trying to carry out a left-wing populist policy based on deficit spending (spending is greater than revenue) amid the economic crisis. According to the theory of left-wing populism, the character of the leader in running the government tends to prioritize the welfare of his people and carry out socialist policies through his power.

In a review of the economic crisis that occurred, the results of this study to indicate that the efforts made by Venezuelan President Nicolas Maduro in facing the crisis to implement policies that support Venezuelan industry as a source of economic income, provide support from the government to local workers and implement government policies to support the economy of the country itself in order to overcome the crisis that occurred. In spite of that, Nicolas Maduro's reasons for the economic crisis occurred, but he responded that he still carried out the deficit spending policies such as his welfare program including increasing minimum worker wages, increasing employment to carry out the foreign cooperation because Nicolas Maduro wanted to increase the legitimacy of his power in Venezuela and want to maintain the identity of the Venezuelan as a bolivarian state.

**Keywords: Economic Crisis, Venezuela, Nicolas Maduro, Left-wing Populism Theory, Hyperinflation, Bolivarian.**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penyusunan skripsi ini terdapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu, ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs, Muhammad Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. H. Azhar, SH., MSC., LL., LL.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai dosen pembimbing (1) satu dan pembimbing akademik yang telah turut membantu dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Retno Susilowati, MM. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Gunawan Lestari Elake S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing (2) dua dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya yang telah memberi pelajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama berkuliah.
7. Bapak dan Ibu Admin dan pegawai di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya yang telah mengurus jurusan dan akademik mahasiswa sehingga berjalannya program program dan kegiatan di lingkungan akademik.
8. Utari, Risna, Windi, dan Arrum sebagai sahabat yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Olie Stiawan Randy sebagai penyemangat dalam mengerjakan skripsi ini.

10. Geng Hungot (Vanes, Mega, Asti dan Rarin) yang telah menemani hari-hari berat penulis saat mengerjakan skripsi ini.
11. Rekan-rekan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya Angkatan 2016 yang memberikan saran dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membaca dan bagi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 22 Oktober 2020



Selvi Adrianti

NIM 07041181621004

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>INTISARI</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1. Tujuan Objektif .....	6
1.3.2. Tujuan Subyektif .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1. Manfaat Penelitian Teoritis .....	6
1.4.2. Manfaat Penelitian Praktis .....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	7
1.6. Landasan Teori .....	10
1.6.1. Kerangka konsep .....	10
1.6.2. Alur pemikiran .....	15
1.7. Argumen Utama .....	16
1.8. Metode Penelitian .....	16

1.8.1. Desain penelitian .....	16
1.8.2. Definisi konsep .....	17
1.8.3. Fokus penelitian .....	18
1.8.4. Unit analisis .....	18
1.8.5. Jenis dan sumber data .....	19
1.8.6. Teknik pengumpulan data .....	19
1.8.7. Teknik keabsahan data .....	20
1.8.8. Teknik analisis data .....	21
1.8.9. Jadwal penelitian .....	22
1.8.10. Sistematika penulisan .....	22
<b>BAB II GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>25</b>
2.1. Biografi Nicolas Maduro .....	26
2.2. Semangat Revolusi Bolivarian .....	28
2.3. Faktor Penyebab Krisis Venezuela .....	35
2.3.1. Penurunan harga minyak mentah .....	35
2.3.2. Kontrol harga dan korupsi .....	37
2.3.3. Kekacauan politik .....	40
2.3.4. Sanksi-sanksi Amerika Serikat .....	42
2.4. Kondisi Politik Venezuela .....	43
2.5. Kondisi Ekonomi Venezuela .....	47
2.6. Kondisi Sosial Venezuela .....	50
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
3.1. Dukungan Industri Dalam Negeri .....	52
3.1.1. Industri minyak dan gas Venezuela .....	52
3.1.2. Diversifikasi ekonomi .....	68
3.2. Dukungan Tenaga Kerja .....	69
3.2.1. Penaikan upah minimum .....	69
3.2.2. Akses pekerjaan untuk kaum muda Venezuela .....	71

3.3.	Intervensi Negara Dalam Perekonomian .....	73
3.3.1.	Menerapkan mata uang digital Petro .....	73
3.3.2.	Mata uang baru Bolivar Soberano .....	74
3.4.	Alasan Maduro Menjalankan Kebijakan Sosialis Populis .....	76
3.4.1.	Meningkatkan legitimasi kekuasaan Maduro .....	76
3.4.2.	Menjaga identitas negara Venezuela sebagai negara Bolivarian .....	77
 <b>BAB IV KESIMPULAN</b> .....		79
4.1.	Kesimpulan .....	79
4.2.	Saran .....	81
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		83

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1. Penelitian terdahulu .....	8
Tabel 1.2. Fokus penelitian .....	18
Tabel 1.3. Rencana jadwal penelitian.....	22
Tabel 3.1. Upah minimum Venezuela.....	70

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1. Grafik perkiraan tingkat inflasi di Venezuela .....	2
Gambar 1.2. Diagram alur penelitian .....	16
Gambar 2.1. Nicolas Maduro .....	26
Gambar 2.2. Grafik harga minyak mentah .....	36
Gambar 2.3. Grafik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Venezuela .....	38
Gambar 2.4. Grafik ekspor minyak mentah Venezuela .....	48
Gambar 3.1. <i>Orinico Oil Belt</i> (OOB) .....	53
Gambar 3.2. Perkiraan pengiriman minyak mentah dari PetroCaribe.....	55
Gambar 3.3. Grafik pinjaman Tiongkok kepada Venezuela .....	60
Gambar 3.4. Impor minyak Tiongkok dari Venezuela .....	61
Gambar 3.5. Impor minyak India dari Venezuela .....	63
Gambar 3.6. Hutang PDVSA terhadap Rosneft.....	64
Gambar 3.7. Grafik tingkat pengangguran Venezuela.....	72
Gambar 3.8. Grafik tingkat inflasi di Venezuela .....	75

## DAFTAR SINGKATAN

AD	: <i>Accion Democratica</i>
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AS	: Amerika Serikat
ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
BBM	: Bahan Bakar Minyak
CARICOM	: <i>Caribbean Coummunity</i>
CDB	: <i>China Development Bank</i>
COPEI	: <i>Social Christian Party</i>
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
ENI	: <i>Ente Nazionale Idrocarburi</i>
EO	: <i>Executive Order</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MBR-200	: <i>Movimiento Bolivariano Revolucionario 200</i>
MVR	: <i>Movimiento Quinta Republica</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
OAS	: <i>Organization of America States</i>
OOB	: <i>Orinico Oil Belt</i>
OPEC	: <i>Organization of The Petroleum Exporting Countries</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDVSA	: <i>Petroleos de Venezuela, S,A</i>
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PSUV	: <i>The United Socialist Party of Venezuela</i>
SIDOR	: <i>Siderurgica de Orinoco Alfredo Maneiro</i>
USD	: <i>United States Dollar</i>



# BAB 1

## PENDAHULUAN

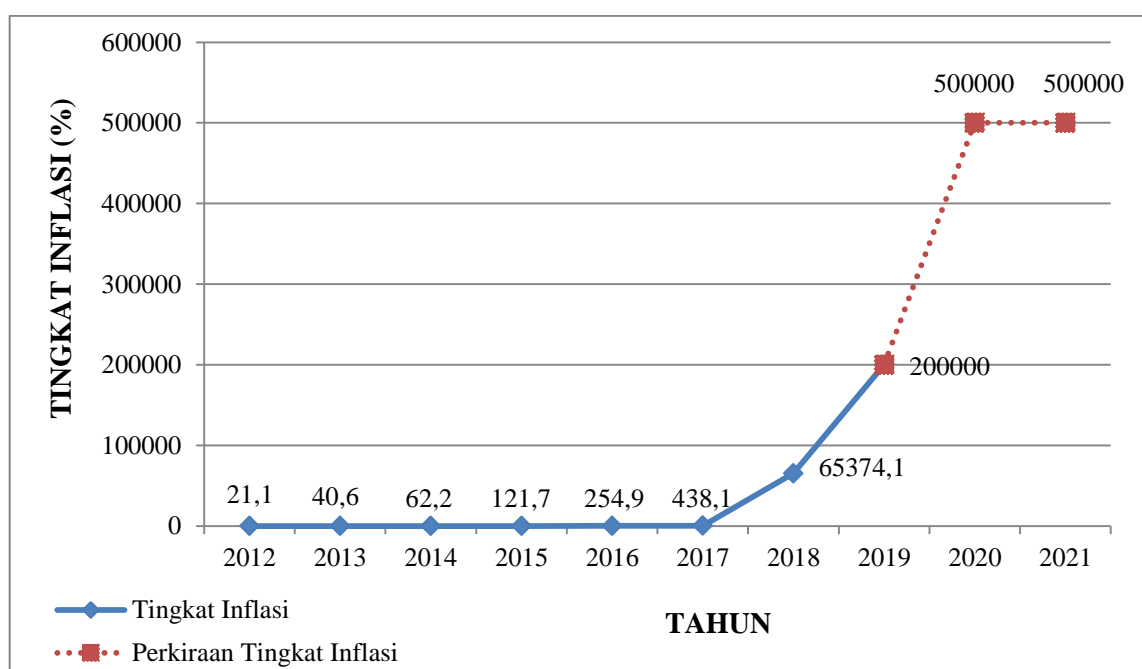
### 1. 1. Latar Belakang

Venezuela sedang mengalami krisis ekonomi seperti hiperinflasi, dan kelangkaan bahan pokok membuat negara tersebut menjadi negara terbelakang di Amerika Latin karena kinerja perekonomian yang terpuruk. Hal ini terjadi akibat *mismanagement* (salah urus) selama fenomena *Boom Oil* (ledakan harga minyak), ketika Hugo Chavez menjabat atau masa saat harga minyak lebih dari \$100 per barrel, Venezuela menerima keuntungan yang cukup dari mengekspor minyak sehingga volume ekspor yang lebih rendah tidak membahayakan ekonominya (Investopedia, 2019). Ketika minyak turun secara signifikan di bawah tingkat harga itu, margin negara itu diperas sampai ke titik di mana Venezuela tidak dapat memenuhi pengeluarannya, yang mengakibatkan peningkatan hutang. Pada awal 2016 harga minyak internasional sampai pada titik terendahnya yaitu \$27 per barrel, pemerintah gagal memangkas pengeluaran dalam menghadapi penurunan pendapatan minyak dan penurunan produksi minyak karena kurangnya pemeliharaan dan investasi (Al Jazeera, 2019). Sehingga jatuhnya harga minyak internasional memberikan pukulan bagi perekonomian negara.

Berdasarkan *World Economic Outlook* yang diterbitkan oleh IMF Data Mapper (2020), secara umum Venezuela pada tahun 2018 mengalami inflasi sebesar 65.374,1% dengan perkiraan sebesar 500.000% terjadi pada 2020 hingga 2021. Akibatnya, kemiskinan meluas dan kelangkaan barang pokok. Pemerintah Venezuela kewalahan dalam menangani inflasi besar-besaran. Hiperinflasi menyebabkan banyak penduduk yang melarikan diri ke negara tetangga. Menurut PBB dan Uni Eropa dilansir dari Reuters

(2019) menyatakan penduduk Venezuela yang eksodus ke luar negeri mencapai 5 juta orang sejak tahun 2015. Negara tujuan para migran meliputi Kolombia, Brazil, Equador, Argentina, Chile, Peru, Spanyol hingga warga yang lebih kaya memilih pindah ke Amerika Serikat dan Kanada membuat pemerintah Venezuela semakin kewalahan dengan dampak krisis ekonomi yang terjadi. Barang-barang pokok semakin sukar didapat, sementara harga terus naik. Bahkan perusahaan-perusahaan raksasa asal Amerika Serikat dan Eropa serta beberapa maskapai penerbangan menghentikan sebagian besar operasinya di Venezuela karena risiko bisnis yang sangat tinggi. *Coca-Cola* mengumumkan bahwa mereka telah menghentikan produksi di Venezuela karena kelangkaan gula. *Goodyear Tire & Rubber Co.* terpaksa menutup salah satu pabriknya yang terletak di Venezuela dan melakukan PHK sejak akhir 2018 lalu. Maskapai penerbangan *United Airlines*, *Lufthansa* dan *Air Canada* telah memutuskan berhenti terbang ke Venezuela sejak Juli 2017 dikarenakan hutang miliaran dollar yang tidak kunjung dibayar oleh pemerintah Venezuela.

Gambar 1.1. Grafik perkiraan tingkat inflasi di Venezuela



Sumber: *World Economic Outlook IMF Data Mapper* (2020)

Melemahnya perekonomian Venezuela seperti hiperinflasi, harga barang dan jasa yang meningkat, kenaikan tindakan kekerasan dan kriminal telah memicu rakyat Venezuela melakukan aksi protes. Pada Februari 2014, gelombang aksi protes oleh kelompok mahasiswa di San Cristobal, Tachira, Venezuela bagian barat, serta kelompok oposisi *The Democratic Unity Roundtable* melibatkan 1,6 juta masyarakat dan memakan korban jiwa sebanyak 43 orang (BBC, 2014). Dalam menangani unjuk rasa yang dihadapi, pemerintah Maduro melibatkan angkatan militer kedalam pasukan keamanan untuk mentertibkan demonstran. Tetapi, *Human Rights Watch* menyikapi bahwa aksi pentertiban yang dilakukan pemerintahan Maduro banyak terjadi pelanggaran HAM. *Human Rights Watch* mengungkapkan bahwa pasukan keamanan Venezuela berulang kali melakukan tindak kekerasan sehingga terjadi pelanggaran hukum terhadap individu - individu yang tidak terlibat dalam kekerasan dan yang tidak ikut dalam aksi unjuk rasa. Pelanggaran yang dimaksud seperti menembakan peluru tajam secara langsung, menggunakan peluru karet dan gas air mata, serta dalam beberapa kasus dengan sengaja menembakkan peluru karet pada jarak dekat pada orang yang tidak memiliki senjata (VOA, 2017).

Tidak hanya kericuhan saja yang terjadi di Venezuela. Namun, tekanan dari berbagai pihak yang tidak puas dengan kinerja Maduro. Banyak pihak yang mengatakan pada pemilu 2018 Venezuela bertransformasi dari cara agar rakyat membuat suara mereka didengar menjadi alat untuk meningkatkan legitimasi kekuasaan Maduro. Apalagi dari pihak oposisi, Juan Guaido yang baru dipilih pada 5 Januari 2019 sebagai Presiden Dewan Perwakilan Rakyat Venezuela melakukan langkah progresif. Ia berinisiatif mengambil alih pemerintahan dengan menjadi presiden sementara, sesuai dengan Pasal 233 Konstitusi Venezuela dinyatakan bahwa apabila presiden tidak mampu melaksanakan jabatannya atau melakukan tindakan inkonstitusional dapat digantikan oleh Presiden DPR (CSIS, 2019). Pada titik inilah krisis ekonomi memicu krisis kekuasaan yang hingga kini masih berlanjut.

Sebagai respon terhadap pelanggaran HAM dan kondisi penurunan demokrasi di Venezuela. Sanksi-sanksi yang diterapkan oleh Amerika Serikat sebagai respon terhadap situasi Venezuela yang tidak kunjung membaik. Selain itu, Venezuela dan Amerika Serikat saling mengusir diplomat karena hubungan kedua negara terus memburuk. Tetapi, penerapan sanksi oleh Amerika Serikat tersebut, Venezuela menjadi semakin tertekan terlebih lagi pada situasi ekonomi Venezuela yang sedang dilanda krisis dikarenakan jatuhnya harga minyak global. Jatuhnya harga minyak telah menurunkan anggaran negara, pemerintahan Maduro berusaha menyesuaikan kebijakan finansial melalui menerapkan mata uang baru dan menggunakan mata uang digital. Pemerintahan Maduro juga telah mencoba untuk menahan laju inflasi melalui kontrol harga (Cerra, 2016, h. 22). Pemerintah Venezuela mencoba berbagai cara untuk mengisi kesenjangan pendanaan dan menghindari dampak krisis. Pemerintah mendekati sekutu China dan Rusia untuk membiayai dan mengamankan pinjaman untuk dibayar kembali melalui ekspor minyak masa depan ("*oil-for-loan*" deals). Selain itu, kebijakan pemerintah Maduro yang kontroversial yaitu menaikkan upah minimum nasional hingga empat kali lipat.

Menurut pengamat liberal, kebijakan ekonomi Maduro tak lebih baik daripada pendahulunya (Dallas News, 2017). Salah satu penyebab krisis ekonomi di Venezuela karena kebijakan populis yang diterapkan oleh Presiden Chavez. Sementara hingga saat ini dilanjutkan Presiden Maduro juga tetap menerapkan kebijakan populis. Maduro menerapkan kebijakan *deficit spending* (pengeluaran lebih besar dari penerimaan pajak) berupa subsidi besar-besaran dan menjaga agar sektor-sektor unggulan negerinya tetap berada di tangan pemerintah. Pemerintah Maduro berusaha mengatasi defisit anggaran yang semakin meningkat dengan mencetak uang secara agresif, padahal kebijakan tersebut sangat berkontribusi terhadap terjadinya inflasi yang akut di Venezuela. Selain itu, terdapat program pemberian minyak dengan menyediakan minyak bersubsidi kepada negara

tetangga Amerika Latin, terutama Kuba, menjadi beban bagi ekonomi Venezuela karena harga minyak ambruk.

Krisis ekonomi yang memicu krisis politik yang terjadi di Venezuela sudah terjadi semenjak Maduro naik ke tahta kepresidenan yang telah membuat pemerintah sulit dalam menangani dampak krisis ekonomi yang terjadi. Penelitian ini menganalisis kebijakan Presiden Maduro dalam menangani krisis ekonomi dengan mempertimbangkan ideologi politiknya yang bersandar pada populisme sayap kiri. Intervensi negara yang aktif dalam perekonomian pada bentuk regulasi, subsidi, program sosial, dan nasionalisasi, meningkatkan kapasitas redistributif negara dan memperkuat sektor industri tradisional merupakan ciri khas populis sayap kiri dalam menjalankan pemerintahan dan menghadapi krisis ekonomi. Disisi lain ada kebutuhan untuk menjaga anggaran stabilitas ekonomi negara. Jika tidak ditangani dengan baik membuat negara tersebut semakin hancur dan terpuruk dalam krisis. Saat ini Pemerintahan Maduro tetap menjalankan kebijakan sosialis yang cenderung berbasis *deficit spending* (pengeluaran lebih besar dari penerimaan pajak). Hal ini menarik untuk dibahas jika dilihat dari ideologinya yang populisme.

## **1. 2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pengertian dan penjelasan serta latar belakang masalah yang ada, maka pokok permasalahan yang penulis analisis yaitu :

1. Faktor - faktor apa yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di Venezuela dan kebijakan apa yang digunakan Maduro untuk menangani krisis ekonomi?
2. Mengapa Presiden Nicolas Maduro tetap menerapkan kebijakan populis dalam menangani krisis ekonomi di Venezuela?

### **1. 3. Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan objektif**

- a. Untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab terjadinya krisis ekonomi dan kebijakan yang diterapkan Maduro dalam menangani krisis ekonomi di Venezuela.
- b. Untuk mengetahui dan memahami alasan Maduro tetap menerapkan kebijakan populis untuk menangani krisis ekonomi di Venezuela.

#### **1.3.2. Tujuan subyektif**

- a. Untuk menyempurnakan persyaratan akademis guna mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya.
- b. Untuk menerapkan ilmu yang sudah diperoleh, sehingga dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bisa menyajikan kontribusi yang positif kepada perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hubungan internasional.

### **1. 4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat penelitian teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi berupa kajian ilmiah tentang ilmu hubungan internasional terutama dibidang kebijakan di luar negeri. Sehingga mampu menyajikan referensi terbaru terkait kebijakan Nicolas Maduro dalam melakukan upaya menangani krisis ekonomi dan politik yang terjadi di Venezuela.

#### **1.4.2. Manfaat penelitian praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui pemaparan pada pihak-pihak yang aktif dalam perkembangan ilmu hubungan internasional

seperti mahasiswa, dosen, pengamat maupun praktisi yang tertarik tentang Amerika Latin terutama Venezuela. Sehingga melalui kajian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi yang bermanfaat.

### **1. 5. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini, penulis mengambil referensi dari beragam penelitian yang terdahulu berkaitan dengan tema penulis supaya menjadi sebuah materi kajian, masukan serta pembandingan dalam penelitian yang diteliti, beragam penelitian terdahulu yaitu:

Pertama, Fernando Dachevsky dan Juan Kornblihtt, dalam penelitiannya yang berjudul *The Reproduction and Crisis of Capitalism in Venezuela under Chavism* yang memaparkan bahwa krisis saat ini adalah bukti dari batas pendapatan negara yang berproduktivitas rendah dan modal swasta yang tidak efisien. Penelitian ini juga menjelaskan mengenai situasi selama proses Chavisme, terjadi perubahan spesifik proses akumulasi modal Venezuela dengan pandangan bahwa proses Chavisme membangun sosialisme abad kedua puluh satu (Dachevsky & Kornblihtt, 2016).

Kedua, Margarita Lopez Maya, dalam penelitiannya yang berjudul *Populism, 21st-century socialism and corruption in Venezuela* yang memaparkan bagaimana ideologi populis yang dibawa rezim Chavez hingga rezim Maduro yang otoritarian mengakibatkan krisis ekonomi berdampak krisis politik ditandai dengan ketidakpercayaan warga terhadap pemerintah Venezuela akibat korupsi dan intervensi asing. Penelitian ini juga menunjukkan bahaya rayuan populis dari seorang pemimpin karismatik, yang berkuasa dapat mengikis semua mekanisme akuntabilitas institusional dan menghancurkan demokrasi dari dalam (Maya, 2016).

Ketiga, Mauricia John, dalam penelitiannya yang berjudul *Venezuelan economic crisis: crossing Latin American and Caribbean borders* yang memaparkan tentang

bagaimana negara-negara tetangga dalam merespon ketidakstabilan ekonomi dan politik yang dihadapi Venezuela khususnya bidang migrasi. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa migrasi berfungsi sebagai solusi alami bagi banyak negara berkembang yang dilumpuhkan oleh ketidakstabilan politik dan ekonomi serta pemerintahan yang buruk (John, 2018).

Berbagai referensi yang disajikan memperlihatkan analisis permasalahan krisis ekonomi di Venezuela yang menjadi sangat penting untuk penulis dalam mengembangkan penelitian ini.

Tabel 1.1. Penelitian terdahulu.

No.	Penelitian terdahulu	Keterangan
1.	Nama penulis	Fernando Dachevsky dan Juan Kornblihtt
	Judul	The Reproduction and Crisis of Capitalism in Venezuela under Chavismo
	Nama jurnal	Latin America Perspective, Vol. 44. No. 1. Hal 78 - 93. DOI : 10.1177/0094582x16673633. Diterbitkan oleh Universidad Nacional de General Sarmiento, Brazil.
	Tahun	2016
	Hasil penelitian	Memaparkan perubahan mendasar dalam hubungan ekonomi dan politik yang dipupuk selama pemerintahan Hugo Chavez pada rezim Maduro hingga krisis.
	Perbandingan	Penelitian ini membahas tentang pemerintahan Maduro yang pada awal kekuasaan hingga sekarang mengalami krisis ekonomi yang akut. Perbandingan berbeda terletak pada objek penelitian. Penelitian sebelumnya membahas bagaimana krisis ekonomi tersebut dimulai dari kebijakan populis Hugo Chavez.



		Penelitian ini membahas bagaimana bentuk upaya yang dilakukan Maduro dalam menangani krisis ekonomi yang telah dipupuk pemerintahan Hugo Chavez yang mengakibatkan krisis politik di rezim Maduro hingga sekarang.
2.	Nama penulis	Margarita Lopez Maya
	Judul	Populism, 21st-century socialism and corruption in Venezuela
	Nama jurnal	Thesis Eleven Vol. 40, No. 4: 68-87. DOI : 10.1177/0725513618818727. Diterbitkan oleh Center for Development Studies (CENDES), Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela.
	Tahun	2014
	Hasil penelitian	Penelitian ini memaparkan bagaimana ideologi populis yang dibawa rezim Chavez hingga rezim Maduro yang otoritarian mengakibatkan krisis ekonomi berdampak krisis politik ditandai dengan ketidakpercayaan warga terhadap pemerintah Venezuela akibat intervensi asing.
3.	Perbandingan	Penelitian ini menjelaskan tentang krisis politik pada awal kepemimpinan Maduro hingga akhir 2014. Perbandingan kajian berbeda terletak pada waktu penelitian. Pada penelitian sebelumnya dibahas tentang kebijakan Chavez dilanjutkan oleh Maduro hingga akhir 2014, sedangkan pada penelitian ini menggambarkan krisis ekonomi dan politik Venezuela hingga awal 2020 serta upaya pemerintahan Maduro dalam menangani krisis tersebut.
	Nama penulis	Mauricia John
	Judul	Venezuelan economic crisis: crossing Latin American and Caribbean borders
	Nama jurnal	Journal Migration and Development Volume 8, 2019 - Issue 3. Hal 1-11. DOI: 10.1080/21632324.2018.1502003. Diterbitkan

		dari Anthropology and Sociology, Kutztown University of Pennsylvania.
	Tahun	2018
	Hasil penelitian	Memaparkan tentang bagaimana negara-negara tetangga dalam merespon ketidakstabilan ekonomi dan politik yang dihadapi Venezuela khususnya bidang migrasi.
	Perbandingan	Penelitian ini menjelaskan tinjauan sistematis terhadap krisis ekonomi dan politik yang terjadi di Venezuela. Perbandingan kajian berbeda terletak pada variabel penelitian. Pada penelitian sebelumnya menjelaskan migrasi penduduk ke negara tetangga, sedangkan penelitian ini menjelaskan usaha pemerintah Venezuela yang dipimpin Maduro dalam menangani dampak krisis tersebut.

## 1.6. Landasan Teori

### 1.6.1. Kerangka teori

Adapun penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut:

#### a. Teori populisme

Menurut Barr (2009, h. 30) mendefinisikan populisme sebagai sebuah gerakan massa yang dipimpin oleh orang luar dengan pandangan yang berbeda dan berusaha untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan seruan anti-kemapanan (*anti-establishment*). Populisme dipahami sebagai sebuah gaya politik yang diterapkan oleh pemimpin untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Kebijakan populisme yang cenderung memberikan kemudahan serta bantuan subsidi dan layanan sosial bagi masyarakat

kelas bawah. Terdapat 2 variasi populisme secara umum mengenai populisme yaitu populisme sayap kanan dan populisme sayap kiri.

Steven Levitsky dan Kenneth M. Roberts (2011, h. 5), berpendapat bahwa aktor politik yang berusaha menggunakan otoritas publik untuk mendistribusikan kekayaan dan/atau pendapatan kepada kelompok-kelompok berpenghasilan rendah, mengikis hierarki sosial, dan memperkuat suara kelompok-kelompok yang kurang beruntung dalam proses politik untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dianggap sebagai populisme sayap kiri. Aktor-aktor tersebut meningkatkan pengeluaran negara, memperluas cakupan program-program sosial, berfokus pada pembuatan lapangan kerja, dan sering mengintervensi pasar tenaga kerja untuk memperluas tunjangan dan hak-hak pekerja.

Sedangkan, populisme sayap kanan menjadikan aktor politik yang tidak menempatkan kebijakan redistributif atau program yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendistribusikan kekayaan, dan kesetaraan sosial di prioritaskan pada agenda program mereka. Sehingga populisme sayap kanan lebih memprioritaskan stabilitas ekonomi dan keamanan negara.

Menurut Aytac dan Onis (2014, h. 41), menggambarkan Amerika Latin telah ditandai oleh pergantian populis-kiri. Literatur tentang Amerika Latin telah memfokuskan pada varian berbeda untuk mengklasifikasikannya dalam hal versi yang lebih lembut, lebih ramah pasar yang terkait dengan Kirchners di Argentina atau Lula da Silva di Brazil serta versi yang lebih radikal yaitu Venezuela di bawah Chavez dan Maduro. Sehingga dalam konteks pemerintah Venezuela saat ini, telah diidentifikasi sebagai Populisme sayap kiri. Populisme sayap kiri menerapkan kombinasi strategi, termasuk nilai tukar yang kompetitif dan intervensi negara yang aktif dalam perekonomian pada bentuk regulasi, subsidi, program sosial, dan

nasionalisasi, secara signifikan meningkatkan kapasitas redistributif negara dan memperkuat sektor industri tradisional. Menurut penelitian Aytac dan Onis (2014, h. 46), mereka berpendapat bahwa karakter kebijakan populis sayap kiri meliputi:

1. Penekanan pada nilai tukar riil yang kompetitif untuk mendukung industri dalam negeri dan lapangan kerja,
2. Dukungan untuk tenaga kerja, dan
3. Intervensi negara yang kuat dan mendasar dalam ekonomi melalui regulasi, subsidi, program sosial, dan nasionalisasi.

Populisme dapat dianggap gagal apabila tidak dapat memenuhi janji politiknya seperti kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Kegagalan tersebut tidak diakibatkan secara langsung karena ideologi populisme yang pro terhadap rakyat. Namun, salah tata kelola ekonomi oleh pemerintah yang populis akibat terlalu bergantung pada sumber daya sebagai sumber utama pendapatan untuk menjalankan proyek populisme yang menguras APBN. Menurut Auty (1993, h. 128), negara dengan kekayaan alam yang sangat melimpah belum tentu bisa membuat negara tersebut menjadi negara yang sejahtera tetapi malah membuat negara tersebut menjadi beresiko terhadap konflik dan juga menimbulkan banyak terjadi korupsi serta eksploitasi sumber daya dengan cara-cara yang tidak bijaksana.

Teori kutukan sumber daya alam (*Resource Curse*) dapat disinggung mengenai terjadinya *mismanagement* (salah urus) yang tidak melihat aspek keberlanjutan kemudian menyebabkan negara tersebut menjadikan pendapatannya sangat bergantung pada hasil perolehan sumber daya alam. Karena cara kerja populisme adalah dengan melalui perasaan masyarakat, selayaknya harus bisa membedakan antara “keinginan” dan “kebutuhan”. Keinginan masyarakat adalah

harga-harga yang terjangkau, sedangkan kebutuhan negara adalah menjaga anggaran APBN supaya stabilitas ekonomi terjaga. Caranya dengan tidak menghentikan subsidi BBM, harga-harga menjadi murah pada mulanya, seiring berjalannya waktu, hutang negara semakin besar dan malah dapat menciptakan bom waktu. Jika tidak segera diantisipasi, dapat diprediksi dengan mudah negara akan mengalami krisis ekonomi seperti hiperinflasi.

b. Konsep Kebijakan Ekonomi Sosial Demokrasi

Kebijakan Ekonomi Sosial Demokrasi merupakan turunan dari konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Di dalam buku *The Three Worlds of Welfare Capitalism* karya Esping-Andersen (1990, h. 18), negara kesejahteraan adalah konsep pemerintahan saat negara mengambil peranan yang penting dalam perlindungan dan memutamakan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Secara rinci, ada beberapa model negara kesejahteraan yang mengalami perkembangan, khususnya di negara - negara maju di Amerika dan Eropa. Perbedaan model negara kesejahteraan biasanya karena adanya perbedaan penekanan tujuan dalam kebijakan setiap negara, disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan realita yang dihadapi.

Esping-Andersen (1990, h. 27) menjelaskan mengenai model Negara Kesejahteraan Sosial Demokrasi (*Social-Democratic Welfare State*) sebagai model yang didasarkan pada prinsip-prinsip universalisme, menyediakan akses pelayanan dan bantuan berdasarkan kewarganegaraan. Model negara kesejahteraan ini memberikan kebebasan otonom yang relatif tinggi kepada warga negara dan membatasi ketergantungan kepada keluarga dan pasar. Standar pelayanan relatif sama untuk semua warga negara tanpa terkecuali, sehingga semua strata

digabungkan menjadi universal, dan partisipasi penuh kelas buruh untuk menggapai kesejahteraan individu dan keluarga. Hal ini memberikan perlakuan yang relatif adil, baik dalam kompetisi pasar dan juga dalam tatanan masyarakat sosial. Model sosial-demokrasi merupakan negara kesejahteraan yang mempromosikan dan mengejar kesetaraan standar tertinggi, bukan kesetaraan kebutuhan minimal seperti yang ditempuh pada model lain didalam bukunya. Model ini menekan pasar, dan akibatnya membangun solidaritas universal yang mendukung negara kesejahteraan.

Kebijakan Ekonomi Sosial Demokrasi pada negara kesejahteraan sebagai upaya mendistribusikan sumber daya yang dimiliki negara kepada warga negara secara merata. Penguasaan ini dipusatkan pada negara yang diharapkan bisa disalurkan kepada rakyat dengan harga yang terjangkau. Esping-Andersen juga menambahkan, pada dasarnya mengacu pada peranan negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisir perekonomian yang mencakup tanggung jawab negara demi menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar. Instrumen utama yang bisa diterapkan oleh pemerintah di sebuah negara meliputi penggunaan anggaran pemerintah difokuskan untuk pembelian barang dan jasa, penerapan pajak progresif sesuai pendapatan bagi seluruh warga negara sehingga semakin besar kekayaan seseorang, maka semakin tinggi juga pajak yang harus dibayarkan dan pemberian subsidi untuk masyarakat yang membutuhkan sebagai solusi atas kemiskinan dan melakukan distribusi pendapatan yang merata.

Model Negara Kesejahteraan Sosial Demokrasi menyediakan jaminan sosial kepada seluruh penduduk dengan cakupan jaminan sosial yang lengkap. Model ini menghilangkan ketergantungan masyarakat dari pasar dengan kebijakan kesempatan kerja penuh. Ciri-ciri model sosial - demokratis menurut Esping-Andersen adalah memiliki satu skema pajak digunakan untuk membayar

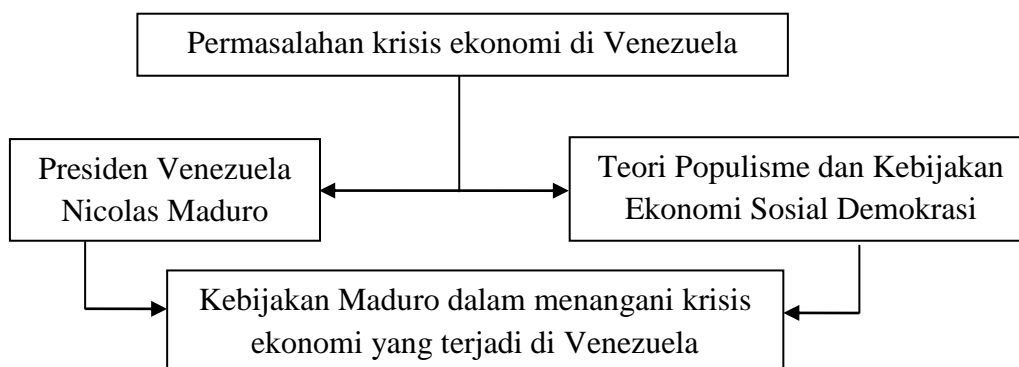
keseluruhan pembiayaan skema kesejahteraan. Skema kesejahteraan ini meliputi layanan masyarakat seperti asuransi dan upah minimum yang menyeluruh dengan standar setinggi - tingginya, dengan akses yang semudah - mudahnya, warga negara dianggap memiliki hak atas pengaturan skema kesejahteraan dengan prinsip keadilan (baik anak-anak, dewasa, kaya maupun miskin) dan kebijakan negara diarahkan pada integrasi industri dan perdagangan dengan skema-skema kesejahteraan tersebut (Esping-Andersen, 1990, h. 28).

### **1.6.2. Alur pemikiran**

Pemerintah Venezuela kurang berhasil dalam memanfaatkan fenomena *Boom Oil* (ledakan harga minyak) karena *mismanagement* (salah urus) dalam menggunakan dampak dari penjualan minyak hanya untuk program sosial dan memperluas subsidi untuk makanan dan energi tanpa melihat aspek keberlanjutan. Pemerintah yang terlalu bergantung kepada sumber pendapatan minyak yang tidak mampu pemerintah kendalikan harganya, menjadikan pemerintah kehilangan sumber anggaran untuk memenuhi janji-janji program kesejahteraannya. Krisis ekonomi yang memicu krisis politik yang terjadi di Venezuela sudah terjadi semenjak Maduro naik ke tahta kepresidenan telah membuat pemerintah sulit dalam menangani dampak krisis ekonomi yang terjadi.

Penelitian ini menganalisis kebijakan Presiden Maduro dalam menangani krisis ekonomi dengan mempertimbangkan ideologi politiknya yang bersandar pada populisme. Respon pemerintah terhadap krisis ekonomi yaitu tetap menjalankan kebijakan sosialis yang cenderung berbasis *deficit spending* (pengeluaran lebih besar dari penerimaan pajak). Disisi lain menurut pengamat liberal, kebijakan populis dianggap sebagai salah satu penyebab krisis ekonomi sehingga menarik untuk dibahas jika dilihat dari ideologinya yang populisme.

Gambar 1.2. Diagram alur penelitian



Sumber: diolah penulis

## 1.7. Argumen Utama

Dilihat dari upaya yang dilakukan Presiden Maduro secara ekonomi tetap berpegang pada konsep negara kesejahteraannya dengan langkah-langkah yang dilakukan tetap berusaha menjalankan kebijakan populisnya yang berbasis *deficit spending* (pengeluaran lebih besar dari penerimaan pajak) ditengah krisis ekonomi. Konsep kebijakan ekonomi sosial demokrasi yang diterapkan oleh Maduro diharapkan mampu mengurangi krisis ekonomi dan perekonomian menjadi tumbuh dan berkembang ketimbang kebijakan *austerity* (penghematan) khas liberal. Sehingga secara politik, konsep kebijakan ekonomi sosial demokrasi bermakna untuk menjaga loyalitas konstituen masyarakat. Selain itu, pemerintah Maduro juga meningkatkan peluang kerja sama internasional dengan sejumlah negara untuk menangani krisis ekonomi di Venezuela sekaligus menjaga anggaran stabilitas ekonomi negara.

## 1.8. Metode Penelitian

### 1.8.1. Desain penelitian

Adapun desain penelitian pada skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. Desain penelitian deskriptif berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai siapa, kapan,



apa, dimana serta bagaimana keterkaitan dengan tema penelitian tersebut. Menurut Nurdin dan Hartati, penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang tersedia, baik bersifat alamiah ataupun rekayasa dengan berusaha menjawab pokok permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang dengan langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi dan analisis data serta pendeskripsian mengenai suatu kondisi secara obyektif (Nurdin dan Hartati, 2019, h. 37). Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan dan menganalisis fakta-fakta tentang kebijakan Maduro untuk menangani krisis ekonomi yang terjadi di Venezuela.

### **1.8.2. Definisi konsep**

Dalam penelitian ini mempunyai berbagai definisi konsep yaitu:

1. Krisis ekonomi menurut Prasetyantoko (2009, h. 64) adalah keadaan yang mengacu pada penurunan performa di sektor ekonomi yang terjadi secara drastis pada suatu negara dan sulit untuk dibendung. Penurunan drastis terhadap perekonomian yang terjadi secara cepat ditandai dengan menurunnya nilai tukar mata uang dan inflasi serta kelangkaan barang pokok karena harga semakin tinggi.
2. Populisme sayap kiri menurut Levitsky S. dan Kenneth M. Roberts (2011, h. 5), mengemukakan bahwa aktor politik yang berusaha menggunakan otoritas publik untuk mendistribusikan kekayaan dan pendapatan kepada kelompok-kelompok berpenghasilan rendah, mengikis hierarki sosial, dan memperkuat suara kelompok-kelompok yang kurang beruntung dalam proses politik untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.
3. Kebijakan Ekonomi Sosial Demokrasi pada negara kesejahteraan menurut Esping-Andersen (2019, h. 27), adalah upaya mendistribusikan sumber daya

yang dimiliki negara kepada warga negara secara merata dan adil dengan peranan negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisir perekonomian yang mencakup tanggung jawab negara demi menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar.

### 1.8.3. Fokus penelitian

Adapun fokus penelitian pada skripsi ini dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Fokus penelitian.

Variabel	Dimensi	Indikator	Deskripsi
Kebijakan Presiden Nicolas Maduro Dalam Menangani Krisis Ekonomi Di Venezuela	Populisme Sayap Kiri	1. Dukungan industri dalam negeri	1. Industri Minyak dan Gas 2. Diversifikasi Produk
		2. Dukungan tenaga kerja	1. Upah minimum 2. Penyediaan lapangan Pekerjaan
		3. Intervensi negara dalam perekonomian	1. Regulasi 2. Nasionalisasi 3. Program sosial

### 1.8.4. Unit analisis

Unit analisis adalah sesuatu yang berhubungan dengan fokus dan pokok penulis. Unit analisis pada penelitian dapat berupa individu, organisasi atau lembaga, kelompok, benda dan waktu sesuai dengan fokus penelitiannya (Bungin, 2007, h. 44). Unit analisis dalam penelitian ini yaitu Nicolas Maduro. Penetapan unit analisis ini karena penulis ingin mengkaji kebijakan Maduro dalam menangani krisis ekonomi di Venezuela.

### **1.8.5. Jenis dan sumber data**

#### **a. Jenis data**

Adapun jenis data yang digunakan pada skripsi ini meliputi data-data yang berbentuk kata-kata atau kalimat verbal. Data kualitatif bisa diperoleh dengan metode studi kepustakaan dari beragam referensi dan hasil olahan dari berbagai referensi atau literatur terkait. Data tersebut dianalisis untuk memecahkan masalah dalam penelitian.

#### **b. Sumber data**

Sumber data yang digunakan penulis yaitu data sekunder yang didapatkan secara tidak langsung melalui pihak dan media perantara yang penulis dapatkan dari beragam sumber, yaitu:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Sriwijaya.
2. Ruang Baca FISIP Universitas Sriwijaya.
3. Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Media cetak dan surat kabar serta media internet.

### **1.8.6. Teknik pengumpulan data**

#### **a. Dokumentasi**

Menurut Kartodirjo (dalam Bungin, 2007, h. 154), dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian dan pada intinya metode ini merupakan metode yang dipakai untuk menelusuri data historis. Dokumentasi yang dimaksud ialah mengumpulkan data berupa gambar dan dokumen terkait. Teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan data kualitatif untuk

mendukung penelitian. Penulis menggunakan dokumentasi dalam hal ini seperti koran, jurnal, majalah, artikel dan data-data dari internet.

b. **Kepustakaan**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menerapkan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode penelitian kepustakaan digunakan untuk menemukan data dari berbagai sumber sekunder seperti dokumen, buku-buku, jurnal, surat kabar, dan situs internet. Kemudian data yang didapatkan diolah dengan menggunakan teknik analisis untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat (Bungin, 2007, h. 55). Selain mencari sumber data sekunder yang menunjang penelitian, juga dibutuhkan untuk mengetahui sampai mana ilmu yang berkaitan dengan penelitian telah berkembang, kesimpulan dan degeneralisasi yang pernah dibuat, sehingga situasi yang dibutuhkan bisa didapatkan dengan mengadakan studi terhadap literatur yang telah ada. Penulis dapat belajar secara lebih sistematis tentang cara membuat karya ilmiah, mengungkapkan pikiran dan menjadikan penulis menjadi lebih kritis.

#### **1.8.7. Teknik keabsahan data**

Dalam sebuah penelitian, keabsahan data sangat penting dan diperlukan untuk membantu suatu penelitian menjadi lebih jelas dan akurat. Teknik keabsahan data yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber data. Teknik triangulasi sumber data merupakan metode untuk menguji kredibilitas data dalam penelitian melalui pemeriksaan dan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber data dengan sumber lainnya (Moleong, 2008, h. 330). Sehingga penelitian diharapkan memperoleh hasil yang akurat dan mendekati kebenaran.

### 1.8.8. Teknik analisis data

Terdapat tiga tahap dalam analisis data, meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan tahap kesimpulan (Bungin, 2007, h. 229). Pada penelitian ini teknik analisis data yang diterapkan oleh peneliti yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data dapat berbentuk rangkuman dengan memilih hal-hal penting dan memilih data yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada tahap ini peneliti memfokuskan pada data yang telah ada, kemudian data tersebut ditetapkan dan dicocokkan dengan penelitian yang diambil. Kemudian data yang cocok disederhanakan dengan maksud mengklasifikasikan data atas dasar penelitian. Data yang didapatkan akan dipadukan dan penulis menelaah tema untuk merekomendasikan data tambahan, selanjutnya penulis melakukan abstraksi data menjadi penjelasan singkat.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan agar memahami data apa yang sesuai dengan objek penelitian. Pada tahap ini dilakukan terlebih dahulu menyajikan data informatif dalam bentuk teks narasi. Hal ini dimaksudkan untuk menyajikan data yang telah direduksi dan diklasifikasikan menjadi bentuk deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam hasil penelitian menggunakan analisis kualitatif. Persoalan - persoalan dijelaskan berdasarkan data-data yang ada, selanjutnya memadukan data data tersebut dengan data lainnya sehingga didapatkan argumen yang baik (Anggito & Setiawan, 2018, h. 220).

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan adalah inti sari dari hasil eksperimen dan pernyataan yang berhubungan dengan data-data penelitian dan hipotesis meliputi alasan-alasan yang menyebabkan data-data penelitian berbeda dengan hipotesis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menyimpulkan apa saja yang didapatkan dari data yang tersedia sesuai dengan kerangka teori.

### 1.8.9. Jadwal penelitian

Adapun rencana penelitian pada skripsi ini dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Rencana jadwal penelitian.

No	Jadwal kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penetapan Penelitian																				
2	Penyusunan draf proposal																				
3	Konsultasi																				
4	Seminar Proposal																				
5	Pengumpulan data																				
6	Pengolahan dan Analisis Data																				
7	Konsultasi																				
8	Ujian Komprehensif																				

### 1.8.9. Sistematika penulisan

Dalam mencerna lebih rinci penelitian ini, maka pembahasan yang disajikan pada skripsi ini dibagi menjadi berbagai sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan menggambarkan tentang permasalahan penelitian, argumen yang mendeskripsikan alasan kebijakan kebijakan Maduro untuk menangani krisis penting untuk dilakukan, dan bagaimana kebijakannya. Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, kerangka konsep, argumen utama, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II GAMBARAN UMUM**

Bab II membahas gambaran umum tentang kondisi atau keadaan Venezuela meliputi gambaran dan informasi yang berkaitan dengan krisis ekonomi hingga memicu krisis politik saat Nicolas Maduro mulai menjabat sebagai presiden. Penjelasan tersebut berupa konteks sejarah, waktu, lokasi, aktor, mekanisme, praktik dan informasi lainnya yang berkaitan sebagai bahan analisis pada BAB III Pembahasan. Selain itu, mencakup juga fakta, bahan, bukti, kasus, dan fenomena. Keseluruhan penjelasan tersebut berhubungan dengan uraian mengenai krisis ekonomi di Venezuela.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Bab III Pembahasan memaparkan analisis dan interpretasi mengenai upaya pemerintahan Maduro dikaitkan dengan kerangka teori populis sayap kiri dan konsep kebijakan untuk menangani krisis ekonomi di Venezuela. Dengan kata lain, bab ini membahas dan menjabarkan mengenai hubungan, mekanisme, dan keterkaitan antar variabel obyek penelitian dengan menggunakan teori dan konsep. Pada dasarnya, analisis dan penjelasan tersebut bersifat konsisten dan komprehensif secara teoritis, metodologis dan substantif.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menguraikan keseluruhan atas penelitian yang berisi kesimpulan serta saran terkait dengan kebijakan yang diterapkan Maduro dalam menangani krisis ekonomi di Venezuela. Penting untuk diingat bahwa kesimpulan adalah penjabaran umum atas analisis yang telah dilakukan, jadi kesimpulan bukanlah semata-mata hanya ringkasan dari analisis.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

Bab II Gambaran Umum membahas tentang keadaan Venezuela meliputi penjelasan mengenai sosok Nicolas Maduro sebagai Presiden Venezuela, gambaran dan informasi yang berkaitan dengan krisis ekonomi hingga memicu krisis politik dan sosial saat Nicolas Maduro mulai menjabat sebagai presiden dan penjelasan mengenai revolusi bolivarian yang dibawa Hugo Chavez sebagai presiden Venezuela terdahulu. Penjelasan tersebut berupa konteks sejarah, waktu, lokasi, aktor, mekanisme, praktik dan informasi lainnya yang berkaitan sebagai bahan analisis pada BAB III Pembahasan. Selain itu, mencakup juga fakta, bahan, bukti, kasus, dan fenomena. Keseluruhan penjelasan tersebut berhubungan dengan uraian mengenai kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Nicolas Maduro di Venezuela dalam menghadapi krisis ekonomi.

#### **2.1. Biografi Nicolas Maduro**

Nicolas Maduro Moros merupakan Presiden Venezuela saat ini, ia lahir pada tanggal 23 November 1962. Nicolas Maduro mulai memimpin sebagai presiden Venezuela sejak tahun 2013 setelah kematian presiden sebelumnya yaitu Hugo Chavez. Walaupun Maduro terkenal karena pernah bekerja sebagai supir bus, Maduro adalah seorang politikus yang cerdas serta mempunyai hubungan yang baik dengan dunia politik. Ia berhasil duduk di puncak kekuasaan dengan menjadi presiden Venezuela, dan berusaha memberikan kejayaan Venezuela yang telah dirampas oleh kejahatan kapitalis liberal, korupsi serta masalah ekonomi. Sama seperti Chavez, Maduro adalah politikus haluan sayap kiri yang membawa program sosialis untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mengatur kontrol pemerintah terhadap lembaga negara maupun swasta serta media. Maduro menikah dengan

Cilia Flores, ia merupakan aktivis Chavista, ia bertemu dengan Maduro saat Hugo Chavez berada di penjara karena usaha kudeta yang digerakkan oleh Chavez pada tahun 1992. Dia mempunyai satu anak yang bernama Nicolás. Maduro mempunyai hobi bermain bisbol dan berkarir di sebuah band rock semasa remaja (Encyclopædia Britannica, 2019) .

Gambar 2.1. Nicolas Maduro



Sumber : *google images*

Maduro tumbuh di Ibukota Venezuela, Caracas, di lingkungan sebuah keluarga yang sederhana dan sudah diajari paham sosialisme sejak usia dini. Ayahnya juga aktif dalam dunia politik berhaluan sayap kiri dan gerakan buruh. Sehingga saat remaja, Maduro juga aktif di gerakan sosialis pula. Setelah lulus dari sekolah menengah, Maduro pergi ke Kuba untuk mempelajari pendidikan politik. Pulang ke Venezuela, dia bekerja menjadi supir bus namun kemudian aktif di himpunan pekerja transportasi. Dengan latar belakang tersebut, Maduro sangat mengerti dan konsisten dengan pandangan sayap kiri. Maduro telah pendukung Hugo Chavez jauh sebelum Chavez menjabat sebagai presiden. Pada tahun 1992, Chavez dipenjara karena melakukan kudeta kepada presiden saat itu Carlos Andres Perez. Maduro merupakan salah satu dari ribuan warga yang mendukung Chavez,

walaupun dukungan tersebut harus disimpan kekuatannya hingga pemilu presiden Venezuela pada tahun 1998 yang dimenangkan oleh Hugo Chavez. Sementara itu, Maduro merupakan anggota penting dari MBR-200 (*Movimiento Bolivariano Revolucionario 200*), dimana Chavez telah menetapkan Maduro untuk masuk ke dalam dunia politik. Selanjutnya, MBR-200 berevolusi menjadi partai politik yang bernama *Movimiento Quinta Republica* (MVR) atau Partai Republik Kelima, saat itu Maduro menduduki posisi strategis di dalam partai. Maduro juga membentuk serikat pekerja transportasi nasional yang didukung Chavez.

Karir politik Maduro dimulai saat terpilih sebagai anggota Kongres di tahun 1998 dan memulai masa jabatannya di tahun 1999. Walaupun dia merupakan seorang legislatif pemula, ia mempunyai loyalitas yang sangat tinggi kepada Chavez. Maduro menjabat sebagai kepala gerakan untuk blok partai Republik Kelima di Kongres. Maduro dilantik untuk memimpin beberapa komite kongres yang strategis, termasuk yang berhubungan dengan masalah sosial, pemuda dan partisipasi sipil. Pada tahun 1999 Presiden Chavez menetapkan untuk menulis ulang Konstitusi. Maduro juga memegang posisi strategis dalam pembentukan konstitusional. Di bawah konstitusi baru, semua mantan anggota kongres bisa dicalonkan kembali, Maduro dengan mudah memenangkan pemilihan sebagai anggota kongres di Caracas untuk masa jabatan 2000 hingga 2005.

Pada tahun 2006 Maduro ditunjuk untuk menjabat posisi sebagai menteri Luar Negeri Venezuela. Selanjutnya, di tahun 2012, Maduro dilantik menjadi wakil presiden Venezuela mendampingi Hugo Chavez. Sebelum Maduro terpilih sebagai presiden Venezuela, dalam kampanyenya ia berjanji akan memenuhi revolusi Bolivarian mentornya yang dianggarkan dari keuntungan hasil penjualan dari industri minyak, sehingga membiayai program-program pendidikan, kesehatan dan pangan gratis kepada masyarakat miskin. Maduro bertekad untuk terus melanjutkan rezim sosialis Venezuela yang telah

dibawa oleh pendahulunya. "Kita, putra-putranya dan putri-putrinya, akan secara kolektif menjamin keberlanjutan revolusi ini. Kami bersumpah bahwa revolusi itu akan dilanjutkan," katanya setelah sebulan Chavez meninggal akibat kanker (Berdikarionline, 2013). Pernyataan-pernyataan dukungan sosialis yang disampaikan Maduro tentu mengundang beragam respon, termasuk dari pihak oposisi. Pihak oposisi merupakan warga kelas atas dan kelas menengah yang mengaku "cukup menderita" terkait kebijakan sosialis yang terlalu memihak masyarakat miskin.

## **2.2. Semangat Revolusi Bolivarian**

Revolusi Bolivarian diambil dari nama Simón Bolívar, seorang pemimpin revolusioner Venezuela dan Amerika Latin di awal abad ke-19, yang terkenal dalam Perang Amerika-Spanyol dalam memperoleh kemerdekaan sebagian besar Amerika Selatan dari kekuasaan Spanyol. Di Spanyol dia dikenal sebagai "*El Libertrador*" atau sang pembebas. Ia dilahirkan di Caracas yang sekarang telah menjadi Ibukota Venezuela. Tokoh inilah yang menginspirasi gerakan revolusioner dibawah Hugo Chavez dalam menjalankan gerakan Bolivarian dan pemerintahannya. Chavez dan pendukung lainnya percaya bahwa Revolusi Bolivarian bertujuan membangun aliansi Amerika untuk menerapkan ekonomi yang bolivarian, nasionalis, dan dipimpin negara.

Awal mula timbulnya pergerakan revolusi bolivarian yang selanjutnya melahirkan rezim sosialis di Venezuela dikarenakan akibat ketidakpuasan masyarakat kepada rezim *punto fijismo* oleh Presiden Carlos Andres Perez yang mengambil keputusan untuk bekerja sama dengan *International Monetary Fund* (IMF). Kerja sama tersebut bertujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang tidak stabil akibat korupsi dan birokrasi, namun hasilnya tidak sesuai harapan. Presiden Carlos Andres Perez bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk memprivatisasi semua sektor ekonomi, yang

berdampak negatif pada ekonomi Venezuela seperti terjadinya kenaikan harga yang tidak dapat dikendalikan pada berbagai macam barang, perusahaan-perusahaan asing membawa seluruh keuntungan yang didapat ke negara asalnya, menerapkan sistem kerja kontrak, pengangguran melonjak hingga 14%, inflasi mencapai 80,7%, yang mengakibatkan lebih dari 80% rakyat Venezuela hidup dalam kemiskinan yang kemudian memunculkan kerusuhan besar di Venezuela. Banyaknya korban yang jatuh menciptakan perpecahan di dalam kelompok angkatan bersenjata. Tentara kemudian terpecah menjadi dua karena sebagian perwira meragukan pemerintah dan mempertanyakan perintah untuk menembak warga sipil. (Soyomukti, 2007).

Beberapa perwira junior yang berpangkat kapten Felipe Acosta Carlos, Jesus Urdaneta Hernandez, Rafael Baduel dan Hugo Chavez Frias kemudian membentuk Pergerakan Revolusioner Bolivarian 200 atau MBR-200. Orang-orang yang mendirikan pergerakan tersebut bertujuan untuk membebaskan rakyat Venezuela dari belenggu penindasan. Mereka menciptakan kelompok diskusi, serta mengorganisasikan tentara-tentara generasi baru yang berasal dari kaum buruh dan kelas pekerja miskin sebagai langkah awal yang dilakukan oleh MBR-200.

Seiring berjalannya waktu, kelompok militer dengan gerakan MBR-200 selanjutnya berinisiatif untuk melanjutkan perjuangan mereka dengan mencoba melakukan kudeta terhadap rezim *punto fijo* pemerintahan presiden Carlos Andres Perez. Pada tanggal 4 Februari 1992 Hugo Chavez dan Nicolas Maduro beserta kawan kawan merealisasikan upaya kudeta yang mereka rencanakan dengan membawa sekitar 5000 pasukan, tetapi rencana tersebut gagal. Kurangnya dukungan dari masyarakat kelas buruh yang merupakan kekuatan utama dari gerakan revolusi menjadi salah satu faktor ketidakberhasilan kudeta tersebut. Sebagian besar masyarakat kelas buruh tidak tahu apa yang sedang terjadi dan tidak memahami tindakan MBR-200. Pada akhirnya, Hugo Chavez dan kawan-kawan

menyerah dengan syarat memiliki kesempatan untuk berpidato di depan televisi nasional. Hugo Chavez mengaku bertanggung jawab atas upaya kudeta ini, dan kemudian dia dijatuhi hukuman 30 tahun penjara karena menentang pemerintah.

Menjelang pemilu 1993 di Venezuela, kudeta yang diprakarsai oleh Chavez dan kawan-kawan menjadi salah satu isu populis yang digunakan oleh para politikus saat itu untuk mencari dukungan rakyat. Rafael Caldera menjadi pemenang dengan mengangkat isu tersebut sehingga mendapat dukungan yang dominan dari mayoritas masyarakat dan beberapa partai politik (partai-partai kiri, sosial demokrat dan kelompok sayap kanan tengah). Pasca memenangkan pemilu, Rafael Caldera membebaskan orang-orang yang terkait dengan upaya kudeta terhadap pemerintah sebelumnya dari dalam penjara pada tahun 1994. Sehingga Hugo Chavez hanya menjalani hukuman selama dua tahun dan hak-hak politiknya kembali utuh karena dinyatakan bersih.

Hugo Chavez menjadi simbol oposisi politik Venezuela setelah keluar dari penjara. Hugo Chavez bersama MBR-200 selanjutnya berkeliling ke pelosok-pelosok di Venezuela untuk merangkul masyarakat dengan membentuk komite-komite bolivarian dan menyerukan pembentukan Majelis Konstituante (Soyomukti, 2007). Program-program yang tersusun secara sistematis digunakan oleh Hugo Chavez bersama gerakannya untuk mengetahui aspirasi masyarakat, serta membantu masyarakat dengan kerja-kerja nyata yang mereka lakukan. Seiring berjalannya waktu, nama Hugo Chavez secara bertahap mulai dikenal orang, dan dukungannya semakin kuat. Keinginan Chavez untuk berpartisipasi dalam politik akhirnya muncul untuk mencapai tujuan perubahan. Chavez belajar dari pengalaman masa lalu dari kudeta yang gagal dan melakukan survei untuk menentukan dukungan masyarakat. Dukungan yang kuat dari masyarakat membuat Hugo Chavez memutuskan untuk mengikuti pemilu 1998.

Pada Oktober 1997, MBR-200 bertransformasi menjadi partai politik MVR (*Movimiento Quinta Republica*) atau “Pergerakan Republik Kelima” yang dibentuk oleh Hugo Chavez dan kawan kawannya untuk terjun kedalam dunia politik. Partai MVR berkoalisi dengan pelajar, aktivis serikat dagang, mantan pejabat militer, pencinta lingkungan, dan partai-partai kecil haluan kiri. Misi yang dikemukakan dalam deklarasi partai MVR (*Movimiento Quinta Republica*) adalah menjamin kondisi kemakmuran yang optimal bagi bangsa, memuaskan aspirasi individu dan kolektif rakyat Venezuela, dan mengamankan umat manusia dalam komunitas nasional. Partai ini merupakan pesaing utama dari dua partai dominan yang telah lama menguasai politik Venezuela, yaitu AD (*Accion Democratica*) dan COPEI (*Christian Democratic Party*). Kedua partai tersebut merupakan pendiri dari pakta *punto fijo* yang berkuasa selama beberapa dekade (Soyomukti, 2007).

Pemilu 1998 pada bulan Desember menandai pertandingan pertama partai yang didirikan oleh Hugo Chavez dan teman-temannya dalam politik Venezuela. Pada pemilihan umum 1998, terdapat tiga calon presiden. Hugo Chavez menjadi calon presiden dari partai MVR, dan dua pesaing utama dalam pemilu (partai AD dan COPEI) sepakat menetapkan satu calon, Henrique Salas Romer. Calon presiden lainnya datang dari jalur independen, yakni Irene Saez.

Tiga poin utama yang dikemukakan dalam kampanye Hugo Chavez yaitu :

1. Pengakhiran rezim *punto fijo*. Hugo Chavez berjanji mengakhiri perjanjian pakta yang dibuat oleh dua partai besar di Venezuela yaitu *Christian Democratic Party* (COPEI) dan *Social Democratic Action Party* (AD) yang telah menciptakan sebuah rezim *punto fijismo* di Venezuela dan menggantinya dengan sistem yang lebih demokratis dari sebelumnya.

2. Mengakhiri perpolitikan yang korup. Membersihkan pemerintahan dari korupsi menjadi janji lain yang dikemukakan oleh Hugo Chavez dalam kampanyenya.
3. Hugo Chavez juga berjanji untuk mengakhiri kemiskinan yang terjadi di Venezuela dengan memasukkan agenda sosial untuk kesejahteraan rakyat Venezuela.

Nama besar yang telah dibangun beberapa waktu sebelum pemilu dan kampanye yang menjanjikan perbaikan ekonomi membawa Hugo Chavez menjadi presiden setelah menang dalam pemilu 1998. Dia mengungguli dua calon lainnya dengan mendapatkan 56,2% suara sedangkan Henrique Salas Romer yang mendapatkan 39,97% suara dan Irene Saez hanya mendapatkan 1% suara. Pada tanggal 4 Februari 1999, Hugo Chavez secara resmi dilantik menjadi presiden. Kemenangan tersebut mengakhiri kekuasaan rezim Punto Fijo, dua partai dominan di Venezuela yang biasanya memenangkan 90% hasil suara pemilu selama beberapa dekade. Rezim memang beralih ke Hugo Chavez, tetapi konstitusi sebelumnya tidak berubah sampai konstitusi 1999 disahkan yang merupakan konstitusi baru di Venezuela.

Setelah memenangkan pemilu tahun 1998, revolusi pertama Chavez adalah mengubah konstitusi agar berpihak pada rakyat. Chavez sangat memahami bahwa konstitusi baru sangat diperlukan untuk sebuah revolusi sebagai upaya mengatur dasar-dasar pengelolaan negara dan bagaimana kekuatan aktif dari bawah harus ikut berperan menjaga semangat bolivarian. Konstitusi baru adalah jembatan dari tatanan kekuasaan lama menuju revolusi Bolivarian. Penyusunan konstitusi baru diterapkan dengan upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat miskin sehingga menghasilkan konstitusi Bolivarian 1999. Hugo Chavez mengusulkan rancangan konstitusi tersebut kepada Majelis Nasional. Untuk memperkuat diri sebagai sosok yang demokratis Hugo Chavez memulai referendum untuk memberlakukan konstitusi yang telah disusun. Dalam referendum 1999 Hugo



Chavez mendapat dukungan mayoritas yang mencapai 59% membuat konstitusi tersebut resmi diberlakukan. Konstitusi Bolivarian tahun 1999 berisi 3 bab dengan 350 ayat membuatnya menjadi konstitusi yang panjang, lengkap, dan komprehensif (Soyomukti, 2007).

Konstitusi 1999 memuat perubahan mulai dari simbolis hingga sistem politik serta ekonomi di Venezuela. Beberapa perubahan pada tataran simbolik negara tertuang dalam konstitusi 1999. Pertama adalah nama negara Venezuela berubah menjadi Republik Bolivarian Venezuela yang disetujui oleh Majelis Nasional. Simbol 8 (delapan) bintang ditambahkan pada bendera Venezuela untuk mewakili provinsi timur Guyana dan memenuhi usulan Simon Bolivar tentang bendera dengan 8 (delapan) bintang. Cap Kenegaraan Venezuela juga telah berubah menjadi figur kuda putih di sebelah kiri, dan menambahkan busur, anak panah, dan pedang untuk mewakili penduduk asli dan pekerja. Perubahan signifikan terlihat pada bentuk republik yang ada pada konstitusi 1999 dengan adanya penambahan cabang kewarganegaraan (*Citizen's Power*) sebagai cabang pemerintahan. Venezuela memiliki 5 (lima) cabang pemerintahan dalam konstitusi 1999 yaitu cabang yudisial (*The Judiciary*), cabang eksekutif (*The Presidency*), cabang legislatif (*The National Assembly*), cabang pemilihan (*Electoral Power*), dan cabang kewarganegaraan (*Citizen's Power*). Selain itu, konstitusi tersebut menjamin kesejahteraan semua masyarakat Venezuela tanpa memandang derajat.

Hugo Chavez melaksanakan reformasi kelembagaan pemerintah melalui Konstitusi 1999 dengan meningkatkan masa jabatan presiden dari 4 menjadi 6 tahun dan membatasi masa jabatannya hingga 2 periode. Majelis Nasional juga menjadi bagian yang mengalami reformasi yang sebelumnya bikameral kemudian menjadi unikameral dengan menghilangkan kekuatan lembaga legislatif. Perubahan pada susunan lama yang sebelumnya memiliki dua kekuatan (bidang) kekuasaan legislatif antara Bidang Deputi

(*Chamber of Deputies*) dan Senat berubah menjadi satu kamar (*single chamber*). Kekuasaan cabang-cabang legislatif juga dikurangi dan diberikan kepada presiden. Hal tersebut memperlihatkan berjalannya proses Bolivarian yang di bawa Chavez di Venezuela. Konstitusi 1999 menjadi sebuah pegangan masyarakat dan pemerintah dalam mengawasi jalannya pemerintahan di Venezuela.

Pada tahun 2007, Hugo Chavez melakukan reformasi terhadap 69 pasal pada konstitusi nasional Venezuela. Beberapa poin penting dalam perubahan konstitusi tersebut adalah:

1. Meningkatkan masa jabatan presiden menjadi 7 tahun yang sebelumnya hanya 6 tahun.
2. Menghilangkan aturan presiden hanya boleh menjabat selama 2 periode.
3. Membatasi kewenangan kepala daerah agar presiden bisa mengubah batas-batas wilayah dan mengangkat wakil presiden.
4. Membentuk dewan komunal seperti dewan komite revolusi yang ada di Kuba.
5. Membatasi hak kepemilikan pribadi oleh elit-elit politik dengan mengganti peraturan tentang status hukum.
6. Menunjuk militer sebagai “Bolivarian” dan mengidentifikasikannya sebagai kaum sosialis dan anti imperialisme secara resmi.
7. Menanamkan pendidikan populer dan sosialis di setiap bidang untuk menghancurkan nilai-nilai lama kapitalisme dan individualisme.

Perubahan pada konstitusi ini membuat Chavez dapat mencalonkan diri kembali sebagai presiden pada pemilu tahun 2012. Chavez pun terpilih kembali sebagai presiden pada Oktober 2012 mengalahkan saingannya dari partai oposisi dengan meraih suara 58,7% (CNE, 2013). Kondisi kesehatannya yang tidak baik membuat dirinya menunjuk

Wakil Presiden Nicolas Maduro untuk memerintah sementara hingga akhirnya Chavez meninggal dunia pada tahun 2013 (JPNN, 2012). Hal ini dilakukan Chavez karena Nicolas Maduro merupakan sosok yang setia dan loyal serta telah bersama sama berjuang untuk menjalankan Revolusi Bolivarian. Meninggalnya Chavez membuat Dewan Pemilihan Nasional harus segera mengadakan pemilihan umum darurat untuk mencari pengganti Hugo Chavez. Pemilihan umum darurat pun dilaksanakan setelah Chavez meninggal.

## **2.3. Faktor Penyebab Krisis Venezuela**

### **2.3.1. Penurunan harga minyak mentah**

Sejak tahun 2014, harga minyak dunia telah terjadi penurunan drastis, sehingga mengakibatkan perekonomian Venezuela mengalami krisis yang parah. Perkembangan ekonomi dan pembangunan yang terjadi pada periode pemerintahan Hugo Chavez telah menurun drastis dan menuju kepada krisis ekonomi. Menurunnya harga minyak dunia yang di sebabkan dari cadangan berlebihan negara - negara produksi dan kesuksesan revolusi energi Amerika Serikat dan Kanada dalam memperoleh *shale gas*. Sehingga negara negara tersebut tidak tertarik lagi untuk mengimpor minyak dan berdampak pada penurunan volume impor minyak mentah Venezuela. Venezuela yang sangat bergantung kepada pendapatan minyak bumi menjadikan perekonomian Venezuela tidak bisa menghindar dari krisis yang sedang terjadi.

Sejak abad ke-20, Venezuela telah menjadi negara pengekspor minyak utama. Faktanya, pada tahun 1920 Venezuela adalah pengekspor minyak terbesar di dunia. Produksi minyak Timur Tengah tidak melebihi Venezuela sampai tahun 1960-an. Sama seperti saat ini, ekspor minyak pada waktu itu telah menyumbang lebih dari 90 persen pendapatan ekspor Venezuela. Akibatnya, semua bentuk produksi ekonomi, seperti pertanian, turun menjadi sebagian kecil dari kegiatan ekonomi negara. Selama harga

minyak naik, yang mereka lakukan cukup konsisten hingga akhir 1970-an, ekonomi Venezuela tumbuh seiring dengan naiknya harga minyak. Ekonomi berkembang pesat ketika harga minyak naik empat kali lipat selama embargo minyak OPEC 1978.

Gambar 2.2. Grafik harga minyak mentah.



Sumber : *Trading Economics* (2020)

Namun, sedikit demi sedikit, harga minyak mulai memasuki fase ketidakstabilan bahkan penurunan, turun di bawah \$ 10 per barel pada tahun 1998, tahun di mana Chavez terpilih sebagai presiden Venezuela. Bersamaan dengan ketidakstabilan harga minyak ini, ekonomi Venezuela juga bergeser dari satu krisis ke krisis berikutnya. Ini menjadi latar belakang pemilihan Hugo Chavez pada tahun 1998. Rakyat Venezuela sudah muak dengan ketidakpastian ekonomi dan penurunan yang konsisten. PDB per kapita riil telah turun 27 persen dalam 20 tahun antara 1979 dan 1999 (Wilpert, 2019). Sementara itu, kemiskinan meningkat dari 15 persen menjadi lebih dari 65 persen. Langkah pertama Chavez di bidang ekonomi adalah menaikkan harga minyak. Dia mengunjungi negara-negara anggota OPEC dan mengadakan pertemuan kedua para kepala negara OPEC di Caracas pada akhir 2000 untuk meyakinkan anggota OPEC agar mematuhi kuota produksi minyak dan menaikkan

harga minyak. Secara bertahap harga minyak naik, dengan dorongan tambahan karena perang Irak pada tahun 2003. Harga minyak terus meningkat secara stabil selama periode ini, mencapai level tertinggi \$ 140 per barel sebelum keruntuhan Lehman Brothers dan krisis keuangan global tahun 2008. Demikian pula, Venezuela ekonomi berkembang pesat dan PDB per kapita terus meningkat 35 persen, dan kemiskinan turun hingga setengah dari 54 persen menjadi 27 persen antara tahun 2003 dan 2007 (The Conversation, 2019).

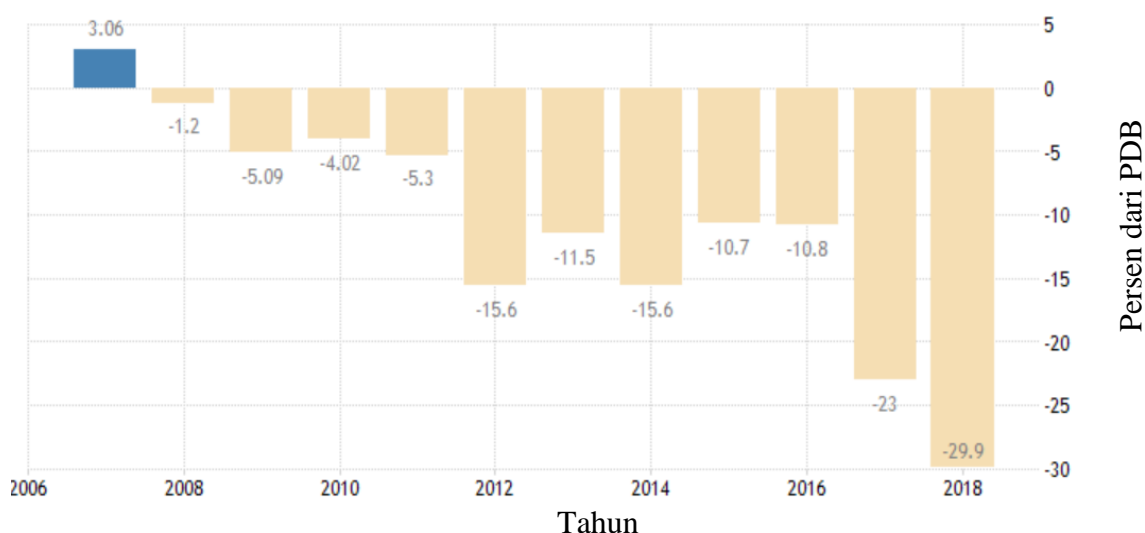
Pada tahun 2013 hingga pertengahan 2014, dimasa awal kepemimpinan Nicolas Maduro, harga minyak dunia masih diatas nilai 100 dolar Amerika Serikat per barel menjadikan perekonomian Venezuela sempat naik, tetapi pada tahun 2014 telah terjadi penurunan drastis harga minyak dunia, hingga mencapai harga dibawah 30 dollar Amerika Serikat per barel yang membuat perekonomian Venezuela mengalami krisis. Hal ini terjadi karena industri minyak merupakan pendapatan dominan dalam PDB Venezuela. Investasi yang tersedia, malah dialihkan ke sektor minyak hingga mendominasi pendapatan ekspor Venezuela. Sebagai negara yang memiliki persediaan minyak mentah terbesar di dunia, hal tersebut memang cukup menolong program-program pemerintahan yang membutuhkan banyak anggaran untuk program - program kesejahteraannya, namun saat harga minyak dunia mengalami penurunan, dampak tersebut sangat terasa terhadap perekonomian negara. Menjadikan PDB negara mengalami penurunan, kenaikan inflasi, devisa negara berkurang dan hutang pun bertambah.

### **2.3.2. Kontrol harga dan korupsi**

Pemerintah Venezuela mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpengaruh terhadap situasi perekonomian negara. Kebijakan pertama yang sangat berpengaruh adalah nasionalisasi aset (Labrador, 2019). Kebijakan pengambil-alihan yang meluas atau nasionalisasi aset oleh pemerintah Venezuela dapat menurunkan produktivitas. Pemerintah

mengontrol lebih dari lima ratus perusahaan yang telah dikuasai. Banyaknya perusahaan yang diambil alih oleh pemerintah cenderung mendorong tindakan korupsi semakin meningkat dan hal tersebut terjadi di Venezuela. Berdasarkan Transparency International (2019) sebagai situs peringkat korupsi global, Venezuela berada di posisi 173 sebagai negara terkorup dari 180 negara. Posisi tersebut dapat memperlihatkan betapa parahnya tingkat korupsi yang terjadi di Venezuela. Tingginya tingkat korupsi menjadikan perusahaan-perusahaan yang diambil alih oleh pemerintah tidak berjalan dengan baik selanjutnya sebagian besar perusahaan mengalami kerugian dalam operasionalnya.

Gambar 2.3. Grafik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Venezuela.



Sumber : *Trading Economics* (2020)

Kemudian, kebijakan-kebijakan pemerintah Venezuela untuk program-program sosialnya juga cenderung menghabiskan dana yang sangat besar sehingga mengalami defisit anggaran. Sejak tahun 2008, pemerintah Venezuela tidak mampu membayar penuh anggaran negaranya. Hal ini mengakibatkan terjadi defisit anggaran yang parah dari minus 1,2 persen terhadap pendapatan tahun sebelumnya, terus mengalami penurunan hingga menembus minus 29,9 persen di tahun 2018. Hal tersebut memperlihatkan betapa buruknya pemerintah dalam mengelola perekonomian negara.

Kebijakan kontrol harga juga diterapkan oleh pemerintah Venezuela terhadap barang-barang kebutuhan primer. Kebijakan tersebut bertujuan untuk masyarakat miskin agar mampu membeli kebutuhan dasar mereka dan membawa dampak baik disisi lainnya. Seolah lupa bahwa dalam prinsip ekonomi, keuntungan menjadi hal yang sangat penting, pemerintah terus memberlakukan kebijakan tersebut tanpa berharap keuntungan. Biaya produksi yang semakin mahal akhirnya membuat produsen mengurangi produktivitas mereka. Barang-barang yang beredar di pasaran semakin berkurang dan menciptakan masalah baru kepada roda perekonomian. Masyarakat mempunyai uang tapi ketersediaan barang minim, sehingga masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Kebijakan lain yang berpengaruh terhadap terjadinya krisis ekonomi di Venezuela yaitu kebijakan mengontrol nilai tukar mata uang. Kebijakan ini sebenarnya telah diberlakukan oleh Hugo Chavez pada tahun 2003 dengan tujuan untuk mengurangi arus modal (CFR, 2017). Pasca kematian Presiden Chavez akibat kanker pada Maret 2013, Kebijakan tersebut tetap dilanjutkan oleh Presiden saat ini Nicolas Maduro untuk menekan laju inflasi agar tidak terjadi disparitas antara mata uang Bolivar dan US Dollar. Pemerintah menerapkan nilai tukar tetap untuk mengendalikan penurunan nilai resmi bolivar terhadap dolar AS, dan mempersulit untuk masyarakat mendapatkan izin untuk menukar bolivar menjadi dolar AS. Hal ini terjadi karena rakyat Venezuela mulai mengubah tabungan mereka menjadi mata uang yang lebih stabil, seperti dolar AS. Hal ini semakin menurunkan nilai bolivar.

Pada tahun 2014 muncul laporan bahwa sejumlah warga negara Venezuela melintasi perbatasan untuk menggunakan ATM di Kolombia. Mereka dapat menarik dana dari rekening Venezuela mereka dalam bentuk dolar AS dengan kurs resmi. Mereka kemudian dapat menyeberang kembali ke Venezuela dan menukar dolar dengan bolivar dengan nilai tukar tidak resmi, menghasilkan keuntungan yang lumayan. Hal ini

mendorong harga dolar AS naik, dan bolivar turun. Ketika krisis semakin dalam, semakin banyak orang Venezuela mulai terlibat dalam pasar mata uang tidak resmi. Sehingga satu dolar yang dibeli dengan harga resmi pada akhirnya hanya berharga 1/100 dari pasar gelap.

Idenya kebijakan kontrol mata uang adalah untuk menstabilkan mata uang secara efektif dengan menutup semua transaksi mata uang. Selain itu juga sebagai sarana untuk mensubsidi barang-barang kebutuhan pokok dengan memungkinkan importir barang-barang seperti makanan dan obat-obatan memiliki akses ke dolar murah. Sistem nilai tukar tetap bekerja dengan cukup baik selama ada cukup dolar yang masuk ke dalam perekonomian. Namun, ketika harga minyak mulai turun, pertama pada tahun 2008 dan kemudian pada tahun 2014, ketika harga minyak turun selama tahun pertama Maduro menjabat, banyak tekanan terjadi akibat selisih antara nilai tukar resmi dan nilai pasar gelap terus bertambah. Pemerintah mengurangi subsidi untuk pembelian dolar dengan tarif resmi dan dengan demikian juga untuk impor. Ini berarti impor turun dan harga dollar langka sehingga meningkatkan inflasi. Pemerintah mencoba untuk mempertahankan harga rendah dengan berpegang pada nilai tukar tetap, dan dengan menerapkan kontrol harga yang lebih ketat. Tetapi aktivitas pasar gelap membuat kebijakan ini menjadi tidak efektif, yang menyebabkan lebih banyak inflasi, lebih banyak distorsi harga, dan peluang korupsi yang tak terhitung jumlahnya.

### **2.3.3. Krisis politik**

Nicolas Maduro berhasil memenangkan pemilihan umum darurat tahun 2013 sebagai presiden Venezuela. Kemenangan Maduro menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Venezuela menginginkan keberlanjutan Revolusi Bolivarian. Kemenangan tersebut pada dasarnya tidak diterima oleh pihak oposisi. Mereka menolak hasil yang diterbitkan oleh dewan pemilihan umum Venezuela. Perbedaan suara yang sangat tipis memang semakin



membuat kelompok oposisi terus menekan untuk diadakannya perhitungan ulang suara. Mereka mengklaim bahwa telah terjadi banyak kecurangan dalam pengadaan pemilihan umum darurat yang dilakukan karena telah meninggalnya Hugo Chavez sebagai pemenang pemilihan umum pada tahun sebelumnya. Namun, seiring berjalannya waktu dengan berat hati pihak oposisi akhirnya menerima hasil dari pemilu tersebut. Mereka menyatakan menerima hasil pemilihan umum akan tetapi pihak oposisi tetap melakukan tekanan kepada pemerintahan Nicolas Maduro. Sesekali mereka juga mempengaruhi masyarakat untuk semakin menjauhi pemerintahan. Penurunan harga minyak dunia pada tahun 2014 menjadikan perekonomian Venezuela semakin hancur dan dijadikan sebagai momentum oleh pihak oposisi untuk terus menekan pemerintahan. Mereka berusaha mengembangkan pandangan bahwa pemerintah Nicolas Maduro telah gagal dalam mengelola perekonomiannya sehingga masyarakat terpuruk.

Pada pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tahun 2015, partai oposisi *Democratic Unity* berhasil memenangkan dengan perolehan 109 kursi di kongres, sangat jauh dengan yang didapatkan oleh partai pemerintah yang hanya merebut 55 kursi. Kemenangan tersebut menjadikan 65 persen kongres didominasi pihak oposisi artinya mereka dapat memberhentikan kabinet Maduro dan meloloskan rencana reformasi yang tidak bisa dibatalkan oleh Presiden Maduro (Al Jazeera, 2015). Kemenangan ini adalah kemenangan pertama pihak oposisi sejak pemerintah Venezuela dikuasai oleh rezim bolivarian yang dipimpin Hugo Chavez. Dalam sejarahnya, kekacauan politik selalu berdampak buruk terhadap perekonomian negara, begitu pula yang terjadi di Venezuela. Majelis Nasional yang dikuasai oleh kelompok oposisi kemudian bergerak dengan menghambat atau mengakhiri program sosialis dan membatasi kekuatan politik Maduro.

Pada Juli 2018, Presiden Nicolás Maduro mengklaim dirinya sebagai presiden Venezuela yang sah secara konstitusional karena ia memenangkan pemilihan umum

persiden. Juan Guaido yang baru satu bulan menjabat selaku Ketua Majelis Nasional Venezuela, pada Januari 2019 menyanggah legitimasi Maduro dan menyatakan jabatan presiden kosong. Kemudian dia mengambil sumpah untuk melayani sebagai Pelaksana Tugas Presiden Venezuela. Pada titik inilah krisis ekonomi memicu krisis kekuasaan yang hingga kini masih berlanjut.

#### **2.3.4. Sanksi ekonomi Amerika Serikat**

Dalam dunia internasional, sanksi ekonomi diterapkan sebagai upaya yang lebih halus untuk memberikan tekanan dan hukuman kepada negara yang telah melanggar hukum internasional, sama seperti sanksi ekonomi dari Amerika Serikat kepada Venezuela. Upaya Amerika Serikat dengan menggunakan instrumen sanksi untuk menekan Venezuela demi memulihkan demokrasi dan melindungi kepentingan nasionalnya, Oleh karena itu, hingga tahun 2018 Amerika Serikat telah memberikan lima Perintah Eksekutif (Treasury, 2020). Kelima Perintah Eksekutif tersebut yaitu :

1. Mengenai pemblokiran aset dan pembatasan visa Sanksi diterapkan kepada 58 pejabat Venezuela berdasarkan E.O 13692 (8 Maret 2015).
2. Membatasi kemampuan PDVSA untuk mengakses mekanisme keuangan Amerika Serikat (E.O 13808) (24 Agustus 2017).
3. Melararang transaksi terhadap mata uang digital Venezuela oleh orang Amerika Serikat (E.O 13827) (19 Maret 2018).
4. Menghalangi pembelian mata uang Venezuela oleh orang Amerika Serikat (E.O 13835) (21 Mei 2018).
5. Penahanan properti dan pelarangan melakukan transaksi (transfer, ekspor, pembayaran, dll) ke Venezuela oleh orang Amerika Serikat (E.O 13850) (1 November 2018).

Semenjak tahun 2015-2018 Amerika Serikat telah menetapkan berbagai sanksi ekonomi sebagai respon terhadap pelanggaran HAM dan nilai-nilai demokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Maduro. Namun, pemberian sanksi ekonomi telah menjadikan kondisi ekonomi Venezuela menurun drastis. Sanksi ekonomi dari Amerika Serikat berdampak terhadap penurunan dalam industri minyak, pertumbuhan GDP menurun, menipisnya cadangan devisa negara, meningkatkan beban utang, perlambatan pertumbuhan perdagangan, hiperinflasi, dan melemahnya nilai tukar mata uang Venezuela sehingga memicu terjadinya krisis ekonomi. Hal ini terjadi karena sanksi memfokuskan industri minyak Venezuela yang merupakan pemasukan utama dalam pendapatan ekonomi negara. Selain itu, sanksi ekonomi juga mengakibatkan perusahaan dan bank asing untuk menghentikan akses keuangan dan transaksi ke Venezuela. Pemberian sanksi juga membuat perekonomian Venezuela semakin bergantung pada bantuan dan pinjaman dari luar negeri.

### **2.3. Kondisi Politik Venezuela**

Setelah meninggalnya Chaves pada Maret 2013, diadakan pemilu presiden Venezuela dengan dua kandidat utama yaitu Nicolas Maduro Moros yang memiliki latar belakang sebagai mantan wakil presiden Chaves dan Henrique Capriles sebagai pemimpin partai oposisi sekaligus mantan gubernur negara bagian Miranda. Pertentangan politik antara pemerintahan Maduro dan Oposisi menciptakan perselisihan antara kelompok pendukung pemerintahan Maduro dan kelompok yang anti dengan pemerintah Maduro. Dalam pidato kampanye, Maduro berjanji untuk setia dan tetap melangkah kepada revolusi Bolivarian yang dibawa Chaves, sedangkan Capriles menyampaikan harus adanya transformasi terhadap perekonomian Venezuela yang mulai melemah, ia menganggap kebijakan sosialis yang dibawa Chaves sudah tak efektif lagi dalam menyelesaikan

masalah dalam negeri. Hasil perhitungan suara di tetapkan pada 15 April 2013 dengan kemenangan tipis oleh Maduro berjumlah suara 50,6% dan Capriles 49,1% (BBC, 2013).

Pada awal Nicolas Maduro menjabat sebagai presiden Venezuela, media kerap kali memprediksi bahwa Maduro merupakan politikus yang tidak dapat di gulingkan, karena ia merupakan pendukung loyal dari Chaves yang setia dan sama-sama berlatar belakang sayap kiri, selain itu dukungan dari militer juga masih kuat berpihak terhadap pemerintahannya. Hal ini terbukti dari komandan militer Venezuela pernah menyuarakan untuk taat kepada Maduro dalam setiap kebijakan sosialisnya. Namun di sisi lain Nicolas Maduro berhasil menduduki tahta pengganti Chaves dengan dukungan dari militer, gelombang oposisi juga mulai menguat di Venezuela, artinya dukungan terhadap nilai perjuangan revolusi bolivarian yang di bawa Chaves terdahulu, kini mulai menghadapi ancaman dukungan sosial, hal itu terlihat pada perbedaan jumlah perolehan suara Nicolas Maduro yang sangat tipis dengan partai oposisi.

Beberapa bulan tak lama Maduro menjabat sebagai presiden Venezuela pada awal tahun 2014, dinamika politik mulai berguncang, terjadi banyak aksi demo oleh mahasiswa di bulan Februari. Unjuk rasa yang pada awalnya berbentuk demo terhadap kasus pemerkosaan seorang mahasiswi hingga kemudian berubah menjadi aksi demo anti pemerintahan Maduro yang mengorbankan 43 orang, hal yang paling mengagetkan adalah salah satu yang menjadi korban dalam aksi tersebut adalah Genesis Carmona dari putri ratu kecantikan Venezuela. Protes awalnya dilakukan agar pemerintah membebaskan mahasiswa yang telah ditangkap. Akan tetapi, tiga orang tertembak oleh pria bersenjata yang tidak dikenal dan memicu unjuk rasa berkelanjutan dari kalangan mahasiswa yang didukung oleh masyarakat pendukung oposisi (Sindonews, 2014). Permasalahan mahasiswa dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah Maduro semakin diperkeruh dengan keterlibatan Oposisi.

Para pimpinan oposisi memanfaatkan momen ini untuk menjatuhkan Maduro dengan ikut berunjuk rasa bersama mahasiswa dan masyarakat. Kehadiran oposisi berhasil mendapat perhatian dari masyarakat, namun petugas keamanan dengan tegas berhasil membubarkan para demonstran. Unjuk rasa yang awalnya dilakukan untuk menuntut peningkatan keamanan dan penyelesaian masalah ekonomi oleh pemerintah Maduro, bertransformasi menjadi unjuk rasa menentang pemerintah. Tindakan tegas dari petugas keamanan menciptakan demonstrasi yang lebih besar dari masyarakat yang menentang pemerintahan Maduro. Para demonstran anti pemerintah menuntut Maduro untuk segera mengundurkan diri sebagai Presiden karena telah gagal dalam mengatasi krisis ekonomi.

Ribuan orang pendukung oposisi mendampingi pimpinan oposisi, Leopoldo Lopez yang ditangkap oleh pihak berwenang karena dituduh melakukan kudeta terhadap Maduro melalui unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat. Satu hari setelah penangkapan Leopoldo Lopez, terjadi demonstrasi di berbagai penjuru Venezuela yang dilakukan oleh kelompok anti pemerintah, diantaranya demonstrasi di Tachira dan Caracas. Demonstran anti pemerintah di daerah bagian Merida dan Tachira memblokir jalan dan menyerang aparat kepolisian (Al Jazeera, 2014). Konflik di kalangan masyarakat Venezuela memperburuk kondisi perpolitikan Venezuela di bawah kepemimpinan Maduro.

Masyarakat Venezuela telah terbagi menjadi dua kubu yang saling berlawanan dan menyerang secara terbuka. Protes yang dilakukan mahasiswa, masyarakat menengah ke bawah, serta masyarakat pendukung kelompok Oposisi, memperoleh tanggapan dari pemerintah dan serangan balasan dari kubu pendukung pemerintah. Pemerintah secara resmi menanggapi demonstrasi Oposisi pada 12 Februari 2014 dengan serangkaian pawai dari pihak pendukung pemerintah yang diikuti oleh ribuan pekerja minyak Venezuela. Pada tanggal 18 Februari 2014 sekelompok pendukung pemerintah melakukan serangan

dengan menembak dan melukai delapan pengunjung rasa di Valencia (Stratfor, 2014). Kondisi masyarakat yang terpolarisasi menjadikan perpolitikan Venezuela semakin kacau.

Setelah lima belas tahun kekuasaan Chavez, Partai Sosialis Bersatu Venezuela atau PSUV selalu dapat menjaga kekuasaannya di kongres, pada tanggal 7 Desember 2015 kelompok oposisi berhasil mengakhiri rekor tersebut dengan menduduki 109 kursi di kongres, pada kemenangan pemilu legislatif Venezuela. Henrique Capriles menyuarakan “Venezuela telah menang dan tidak dapat di rubah”, sedangkan calon – calon dari kelompok oposisi yang terpilih mengatakan bahwa dengan terpilihnya mereka di parlemen akan dengan mudah membentuk undang-undang untuk melepaskan tatanan politik serta mengamandemen kebijakan yang di terapkan oleh anggota parlemen sebelumnya (BBC, 2015). Dengan dominannya kelompok oposisi di parlemen, tentu saja menimbulkan gejolak di dalam pemerintahan Maduro karena mereka tidak searah dengan kebijakan kebijakan sosialis dari Maduro.

Maduro mencalonkan dirinya kembali sebagai presiden untuk periode kedua pada tahun 2018 dan memenangkan pemilihan umum. Namun, pemilu tersebut dinilai banyak pihak, termasuk masyarakat Venezuela dan oposisi sebagai pemilu yang penuh kecurangan, apalagi Maduro menang dengan mendapat perolehan 67,8% suara. Namun tingkat partisipasi warga negara Venezuela dalam pemilihan presiden tersebut sebesar 46,7%, angka ini sangat rendah dibandingkan pemilu tahun 2013 sebanyak 80%. Maduro mengklaim bahwa pemilihan presiden tahun 2018 membuatnya sebagai presiden Venezuela yang sah dan menuduh kelompok oposisi, Amerika Serikat, dan pemerintahan asing lainnya untuk mendorong kudeta.

Juan Guaido sebagai Presiden Dewan Perwakilan Rakyat berinisiatif mengambil alih pemerintahan dengan menjadi presiden *ad-interim*, sesuai dengan Konstitusi Venezuela. Guaido mengklaim sebagai Pelaksana Tugas Presiden yang konstitusional

setelah Majelis Nasional menyatakan posisi kepresidenan sebagai “kosong” berdasarkan Pasal 233 konstitusi Venezuela, yang memungkinkan diangkatnya pelaksana tugas presiden untuk menggantikan pejabat presiden setelah meninggalkan jabatannya, sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Nasional. Guaido juga didukung oleh lebih dari 40 negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan seluruh anggota Uni Eropa serta NATO. Tak sampai di situ, organisasi internasional seperti IMF dan PBB juga memberikan dukungan atas klaim kepemimpinannya. Guaido menyampaikan tindakannya sebagai langkah yang sesuai dengan hukum untuk keluar dari krisis ekonomi dan politik negara itu. Maduro sendiri menjelaskan bahwa dirinya berhasil memenangkan pemilihan presiden, Guaido berjanji akan mengadakan pemilihan presiden begitu dia memiliki kontrol nyata atas pemerintahan (The Conversation, 2019).

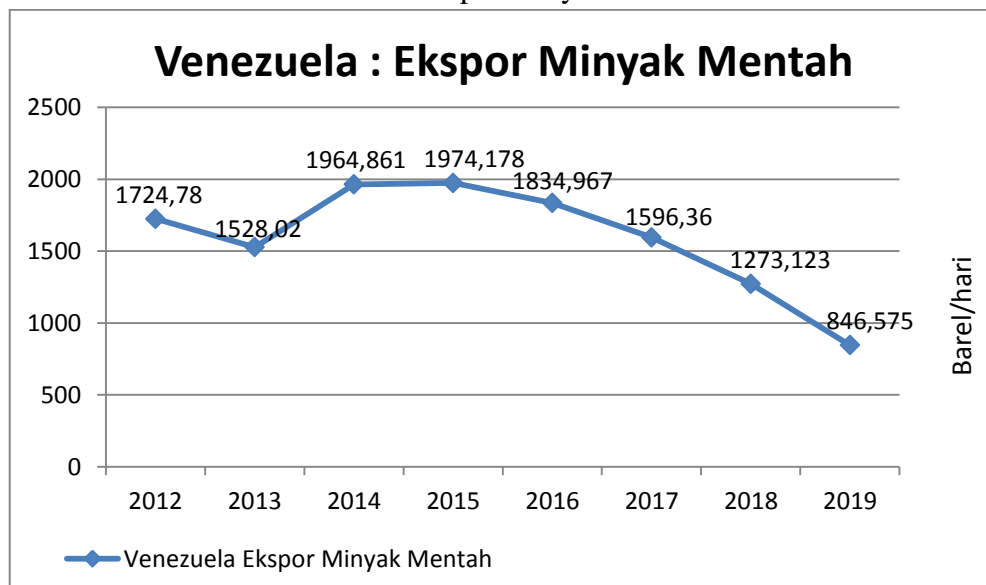
Namun, posisi Maduro sebenarnya masih cukup kuat. Selain didukung oleh angkatan militer yang turut memainkan peran penting dalam pemerintahan, ia juga didukung oleh negara-negara yang mengidentifikasi diri mereka sebagai "musuh Amerika Serikat" atau yang kurang setuju dengan kebijakan represif Amerika Serikat terhadap Venezuela, seperti Rusia, Iran, dan Tiongkok.

#### **2.4. Kondisi Ekonomi Venezuela**

*The International Finance Corporation* menerbitkan hasil penelitiannya bahwa Venezuela berada diperingkat 180 dari 185 negara termurah dalam melakukan bisnis, sedangkan upaya dalam melindungi investor dan pajak menjadi peringkat terburuk (IFC, 2013). Menurunnya harga minyak dunia yang di sebabkan dari cadangan berlebihan negara - negara produksi dan kesuksesan revolusi energi Amerika Serikat dan Kanada dalam memperoleh *shale gas*, hal ini menjadikan perekonomian Venezuela di pemerintahan Maduro menjadi kelabakan, Venezuela yang selama ini penghasilan minyaknya mampu

menjalani 95 persen roda kepentingan di kawasan dan di negaranya, sekarang menjadi pincang. Harga minyak dunia yang biasanya menembus 100 dollar Amerika Serikat per barel, kini hanya mencapai 20 dollar Amerika Serikat per barel. Meskipun Amerika Serikat yang dulu terbilang sangat tertarik untuk mengusai lahan-lahan minyak bumi, sekarang tak terlalu lagi membutuhkan impor minyak milik negara-negara produsen besar, seperti Venezuela, Amerika Serikat bahkan mengurangi volume impor minyak hingga lebih dari 50 persen. Hal ini berdampak pada penurunan ekspor minyak mentah Venezuela.

Gambar 2.4. Grafik ekspor minyak mentah Venezuela



Sumber: *Ceicdata* (2020)

Menurunnya harga minyak dunia yang terjun bebas berdampak pada program sosialis pemerintahan Maduro menjadi tidak efektif. Dampak tersebut menciptakan ketidakstabilan situasi dalam perkembangan ekonomi di Venezuela. Tekanan menyebabkan terjadinya inflasi hingga menuju hiperinflasi berkepanjangan. Pada awal kepemimpinan Maduro di tahun 2013, tingkat inflasi naik 40%, selanjutnya tahun 2014 sebesar 62%, tahun 2015 mencapai 121% dan tahun 2016 sebesar 254% (Statista, 2020). Kemudian di lanjutkan dengan nilai tukar mata uang negara yang anjlok. Pada tahun 2015



pengamat *Capital Economics*, Edward Glossop menerbitkan hasil penelitiannya bahwa satu dolar AS senilai dengan 175 bolivar dan meningkat tajam pada akhir tahun senilai 865 bolivar. Tetapi ditahun 2016 satu dolar Amerika Serikat telah mencapai 1.200 bolivar. Sehingga, nilai bolivar hanya senilai 0,0011 dolar Amerika Serikat, bahkan tak mencapai satu sen (CNBC, 2019).

Dampak selanjutnya yaitu munculnya gelombang krisis kebutuhan dasar. Hampir 70 persen kebutuhan pokok di Venezuela seperti susu, gula, popok, tepung, barang-barang medis, tisu, dll mengandalkan impor dari luar negeri. Penurunan nilai mata uang yang semakin anjlok menjadikan pemerintah tak mampu lagi membiayai impor bahan dasar, sehingga kebutuhan pokok saat itu sangat terbatas sehingga membuat harga menjadi tak terkontrol, bahkan harga satu roti burger saat itu dijual dengan harga 1.700 bolivar atau seharga dengan 3,3 juta rupiah (Kompas, 2016). Selain itu, sentimen pasar yang terus menerus melesu melahirkan mafia-mafia bisnis dalam pasar gelap, Harga sejumlah barang dapat dijual dengan memperoleh keuntungan lebih besar. Pemerintah sempat menyampaikan klaim bahwa 40% dari kebutuhan dasar yang harusnya didistribusikan kepada masyarakat, telah diselundupkan ke negara-negara tetangga. Pada oktober 2015 terbukti dan pemerintah Venezuela berhasil menyita 3.500 ton sembako di perbatasan yang akan di selundupkan ke Kolombia (Breitbart, 2014), hal inilah kemudian menjadi salah satu dampak terbatasnya kebutuhan dasar yang mengakibatkan kelaparan massal di Venezuela.

Pada tahun 2016, *Doing Business* menerbitkan informasi penelitian bahwa Venezuela menempati peringkat terendah 186 dari 189 negara, dalam kategori negara tujuan bisnis, pajak dan perdagangan internasional. Sejak berkembangnya kondisi krisis Venezuela, sebagian pabrik besar seperti perusahaan negara SIDOR dan Orinico Steel, turut menderita. Emas yang diproduksi menurun 64,1 %, produksi besi berkurang 49,8%, produksi aluminium dan baja turun 33,5%. Hasil tersebut tercatat sebagai rekor terburuk

sejak tahun 1980-an dalam sejarah industri di Venezuela. Selanjutnya proyek kereta api strategis di Venezuela juga dihentikan karena pemerintah tidak dapat membayar tagihan sebesar 7,5 miliar dollar Amerika Serikat dan hutang kepada perusahaan asing *China Railway* mencapai 500 dollar Amerika Serikat (SCMP, 2013). Produsen mobil seperti Toyota, General Motors, dan Ford sejak tahun 2015 mulai menurun dan beberapa telah berhenti beroperasi.

Venezuela juga mempunyai hutang dengan maskapai penerbangan asing yang mencapai 4,0 miliar dollar Amerika Serikat. Bahkan sejumlah maskapai penerbangan internasional pun sudah berhenti beroperasi yaitu maskapai TAP Airlines, United Airlines, TAME, Air Europa, dan Air Canada (Latimes, 2014). Dilanjutkan pabrik - pabrik swasta yang menyerap banyak tenaga kerja juga mulai meninggalkan Venezuela dikarenakan cadangan material untuk aktifitas produksi tidak tercukupi. Sebagian perusahaan swasta lain yaitu, Coca Cola dan Polar Bear tutup, dengan alasan yang sama yaitu bahan baku yang terbatas dan juga sudah tidak mempunyai modal lagi untuk beroperasi. Akibatnya ribuan bahkan jutaan pekerja buruh swasta kini mulai terancam.

## **2.5. Kondisi Sosial Venezuela**

Dampak kekacauan politik serta hancurnya perekonomian negara menjadikan rakyat Venezuela sebagai korban yang paling sengsara menderita, bahkan tidak hanya masyarakat kecil saja yang menjadi korban, tetapi sudah berdampak pada rakyat kelas menengah. Perkembangan tingkat kemiskinan dan pengangguran pertahun sejak kepemimpinan Maduro menjadi presiden sama pesatnya dengan fenomena inflasi dan laju devaluasi mata uang bolivar terhadap dollar Amerika Serikat. Ketika Maduro diawal memasuki jabatan sebagai presiden pada tahun 2013, angka kemiskinan telah menembus zona memprihatinkan dengan angka 30%. Bertepatan dengan PDVSA yang mengurangi

anggaran untuk program-program sosial pemerintah sebesar 21% karena krisis finansial yang sedang Venezuela alami (INE, 2020).

Di tahun 2015, Luis Pedro Espana seorang sosiolog dari Universitas Catolica Andres Bello menyampaikan sebuah hasil penelitiannya, peningkatan angka kemiskinan Venezuela telah mencapai 48%. Pedro juga meramalkan pada tahun 2015 akhir, kemiskinan meningkat sebesar 70%. LSM PROVEA di Venezuela juga melakukan penelitian, mereka mengumpulkan hasil penelitian universitas dan membenarkan perkiraan Pedro, dengan kesimpulan penelitian bahwa sekitar 73% dari rakyat Venezuela telah masuk dalam kemiskinan (El Universo, 2015). Selain itu pendapatan upah minimum pegawai negeri Venezuela di tahun 2012 berdasarkan nilai kurs mata uang dolar sekitar 360 dollar Amerika Serikat per-bulan menjadi 20 dollar Amerika Serikat pada tahun 2015 (Bloomberg, 2015). Walaupun pada pertengahan tahun 2016 pemerintah menerapkan kebijakan dengan menaikkan upah minimum 30% sebesar 15.051 bolivar, dalam mata uang dollar berjumlah 40 dollar atau jika di rupiahkan sebesar Rp 530.000 per-bulan, masih di rasa sangat berat oleh masyarakat Vennezuela dikarenakan harga-harga kebutuhan pokok yang mahal dan terbatas.

Kini gejolak sosial terus terjadi di Venezuela, setiap harinya dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore terjadi antrian panjang di supermarket-supermarket secara rutin serta spanduk-spanduk bertuliskan “kami lapar” terus menghantui seluruh jalanan di Venezuela. Pemerintahan Nicolas Maduro terlihat belum mampu menangani krisis pangan, terbukti pada 17 juni 2016 setelah setahun pemerintah menutup perbatasan Kolombia – Venezuela, kini gerbang perbatasan terbuka lebar, seluruh masyarakat Venezuela menyerbu seluruh supermarket - supermarket yang ada di Kolombia untu memenuhi kebutuhan pokok mereka (Viva, 2016).

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

Bab III Pembahasan memaparkan analisis dan interpretasi mengenai upaya pemerintahan Maduro dikaitkan dengan kerangka teori populis sayap kiri dan konsep kebijakan negara kesejahteraan untuk menangani krisis ekonomi di Venezuela. Dengan kata lain, bab ini membahas dan menjabarkan mengenai hubungan, mekanisme, dan keterkaitan antar variabel obyek penelitian dengan menggunakan teori dan konsep. Menurut teori populisme sayap kiri, karakter pemimpin dalam menjalankan pemerintah cenderung mengutamakan kesejahteraan bagi rakyatnya dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang sosialis dengan mendapatkan/menggunakan kekuasaan yang dimilikinya. Dalam tinjauan krisis ekonomi yang terjadi akan dibahas mengenai kebijakan-kebijakan yang mendukung perindustrian Venezuela sebagai sumber pendapatan ekonomi, dukungan pemerintah terhadap tenaga kerja dan kebijakan pemerintah yang mendukung perekonomian Venezuela dalam mengatasi krisis yang terjadi. Selain itu penulis juga ingin membahas mengenai alasan Presiden Nicolas Maduro di saat terjadi krisis ekonomi, namun ia merespon masih tetap menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut seperti program program kesejahteraannya meliputi menaikkan upah minimum, meningkatkan lapangan pekerjaan hingga melakukan kerja sama luar negeri.

### **3.1. Dukungan Industri Dalam Negeri**

#### **3.1.1. Industri Minyak dan Gas Venezuela**

Venezuela mempunyai persediaan minyak terbesar di bumi ini. Pada akhir 2018, persediaan minyak terbukti mencapai 303.300 juta barel ("mm bbl"), sesuai dengan Tinjauan Statistik BP Energi Dunia 2019. Menurut data resmi terakhir yang dikeluarkan

oleh PDVSA dalam Laporan Manajemennya untuk tahun 2016, hanya 13,56 % dari cadangan terbukti (40.995 mm bbl) sesuai dengan minyak mentah konvensional (kondensat, ringan, sedang, dan minyak berat) dan sisanya 86,43% untuk cadangan minyak mentah ekstra berat (261.253 mm bbl), yang sebagian besar berlokasi di *Orinoco Oil Belt*.

Gambar 3.1. *Orinoco Oil Belt* (OOB)



Sumber: PDVSA

Sebagian besar cadangan minyak Venezuela terbukti adalah cadangan minyak mentah berat yang terletak di *Orinoco Oil Belt* (OOB) di Venezuela tengah, membuat minyak mentah Venezuela agak mahal untuk diproduksi, tetapi secara teknis relatif sederhana. Tersebar lebih dari 19.000 mil persegi, OOB dibagi menjadi 36 blok dalam 4 area eksplorasi: Boyaca, Junin, Ayachucho, dan Carabobo. Venezuela mengizinkan perusahaan asing untuk berinvestasi, tetapi negara tersebut mengharuskan PdVSA untuk memiliki setidaknya 60% ekuitas dalam usaha patungan. Mitra usaha patungan utama termasuk Chevron, *China National Petroleum Corporation*, ENI, Statoil, Total, dan Rosneft. Selain wilayah Sabuk Minyak Orinoco, Venezuela juga memiliki cadangan di sekitar Danau Maracaibo di bagian barat.

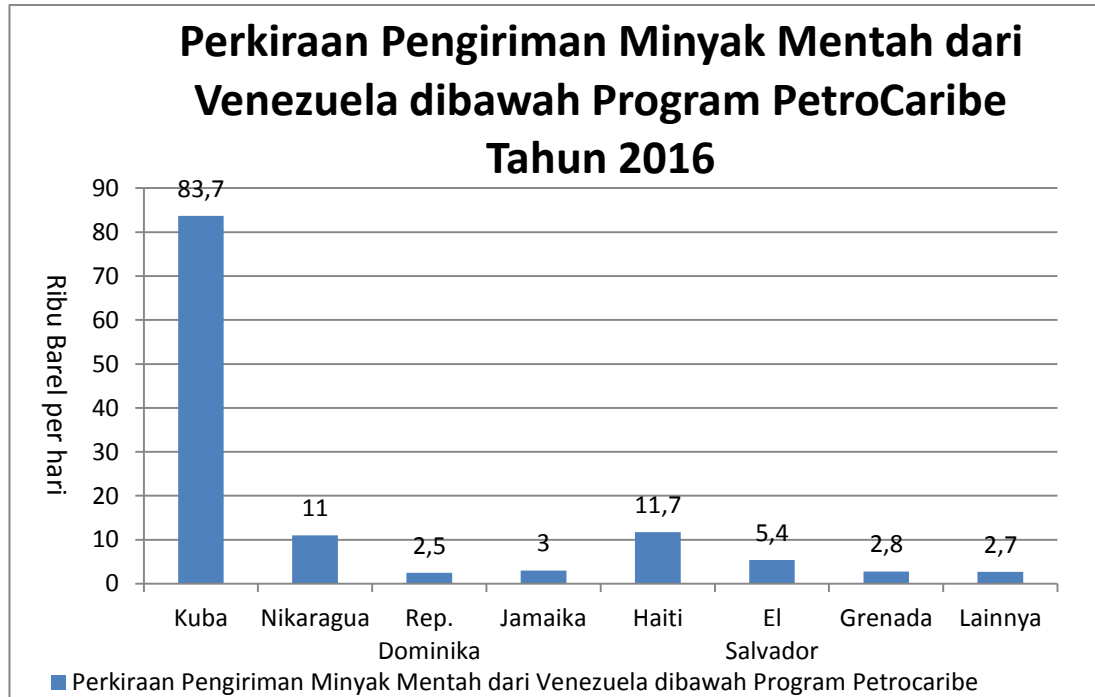
Venezuela menasionalisasi industri minyaknya pada tahun 1970-an, menciptakan *Petroleos de Venezuela S.A* (PdVSA), perusahaan minyak dan gas alam yang dikelola negara. Selain menjadi perusahaan terbesar di Venezuela, PdVSA menyumbang bagian yang signifikan dari produk domestik bruto (PDB) negara itu, pendapatan pemerintah, dan pendapatan ekspor. Di darat, PdVSA bekerja untuk meningkatkan produksi dan kapasitas di lokasi yang ada, termasuk di ladang Anaco, ladang Barrancas, dan Yucal Placer. Di luar negeri, PdVSA telah memberikan blok eksplorasi kepada perusahaan minyak internasional, termasuk Total, Statoil, dan Chevron, di Plataforma Deltana, Marsical Sucre, dan di daerah Blanquilla-Tortuga di lepas pantai timur laut Venezuela. Eksplorasi lepas pantai telah menghasilkan banyak penemuan gas alam yang sukses, termasuk penemuan Repsol-YPF dan ENI tentang 6 triliun kaki kubik (Tcf) –8 Tcf gas alam yang dapat dipulihkan di ladang Perla, yang terletak di blok Cardon IV di Teluk Venezuela — satu penemuan gas alam terbesar dalam sejarah negara Venezuela. Pada Juli 2015, operasi dimulai di proyek lapangan Perla (EIA, 2020).

a. Program PetroCaribe

Pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Maduro berkaitan erat dengan arah kebijakan yang dicanangkan oleh Chavez pada masa pemerintahannya. Walaupun dalam keadaan negara yang sedang mengalami krisis saat ini, dengan kemerosotan yang sangat drastis pada situasi politik dan keadaan ekonomi, Presiden Maduro masih berkeinginan kuat untuk menciptakan sistem multipolar di dunia. Hal ini dapat direalisasikan dengan menjalin solidaritas dan persahabatan antarnegara dengan program PetroCaribe ini. Program ini juga ditujukan untuk menyokong kekuatan Venezuela di sektor minyak, yang dapat mendukung perekonomiannya. Adapun relasi yang dimaksudkan adalah menjalin hubungan dengan negara-negara

luar untuk menarik bantuan luar negeri, sebagai upaya untuk membangun dan menanggulangi krisis yang terjadi.

Gambar 3.2. Perkiraan pengiriman minyak mentah dari PetroCaribe



Sumber: <https://worldview.stratfor.com/>

PetroCaribe tidak menawarkan minyak murah, karena kewajiban Venezuela terhadap OPEC melarangnya untuk melakukan penjualan di bawah nilai pasar. Sebagai gantinya, pendekatan inovatif yang digunakan memungkinkan negara-negara kawasan untuk menunda pembayaran (Lai, 2006). Selain itu, hutang negara-negara Karibia ini dapat diamortisasi secara parsial dengan cara membayar atau menukarnya dengan barang dan jasa. Negara anggota dapat membayar Venezuela dengan hasil pertanian dan perkebunan, seperti tebu, beras, pisang, maupun bentuk-bentuk jasa seperti tenaga medis (Jacome 2011). Pemerintah Venezuela yang saat ini dipimpin oleh Nicolas Maduro mendeklarasikan komitmennya dalam program PetroCaribe pada konferensi PetroCaribe tahun 2015 lalu sebagai upaya untuk meningkatkan

solidaritas dengan negara-negara anggota. Sebagai contoh, Venezuela dan Kuba mencanangkan program yang dikenal sebagai “*Oil for Doctors*”, di mana Kuba mengirim lebih dari sepuluh ribu dokter, perawat, dan dokter gigi untuk memberikan perawatan kesehatan gratis bagi komunitas termiskin yang ada di Venezuela, dengan imbalan 83.700 barel minyak Venezuela per hari di tahun 2016. Selain itu, Nikaragua mengirim lebih dari 15.000 ton gula dan 20.000 ton kacang hijau sebagai bagian dari sistem pembayaran pada program PetroCaribe. Dalam satu hari, Venezuela diperkirakan mengekspor minyak mentah sebanyak 122.800 barel per hari. Artinya dalam sehari Venezuela dapat mengumpulkan 4 juta dollar, uang itu dimaksudkan untuk mengangkat masyarakat Venezuela keluar dari kemiskinan, memberikan layanan sosial, memodernisasi infrastruktur mereka, dan menstabilkan ekonomi. Di bawah perjanjian tersebut, Venezuela akan menanggung biaya pengiriman, bantuan dalam pengembangan infrastruktur distribusi dan situs penyimpanan, berkontribusi pada pembentukan fasilitas yang dikontrol negara, dan menyediakan sistem hemat bahan bakar di negara-negara anggota.

PetroCaribe merupakan bentuk diplomasi minyak yang digagas oleh Venezuela, lebih tepatnya oleh mantan presiden Hugo Chavez sebagai pemimpin Venezuela dari tahun 1999 hingga tahun 2013. PetroCaribe ini didirikan pada tanggal 6 September 2005 dan digunakan sebagai sarana bagi negara-negara di Karibia yang ingin membeli minyak mentah dengan menyediakan kredit dengan harga murah. PetroCaribe terus dilanjutkan oleh Presiden Nicolas Maduro, yang berkuasa dari tahun 2013 hingga sekarang. Program ini memiliki tujuan untuk menyediakan minyak bagi negara-negara di kawasan Karibia dengan harga yang murah dan sistem pembayaran yang memudahkan negara pembeli (Lai 2006). Negara-negara yang membeli minyak dari Venezuela dapat menyicil pembayaran di muka dari 30%



hingga 95%. Sisa dari pembayaran dapat dibayar dengan jangka waktu sangat lama, berkisar dari 17-25 tahun, dan dengan suku bunga 1-2 persen. Di sisi lain, ketergantungan negara penerima terhadap PetroCaribe telah mengikis kebebasan mereka dalam berpolitik.

Venezuela sering dianggap menggunakan PetroCaribe untuk menyebarkan pengaruh ke Organisasi Amerika Serikat atau OAS. Di tengah krisis ekonomi dan inflasi besar-besaran yang terjadi di Venezuela, negara tersebut masih memegang predikat selaku negara dengan persediaan minyak mentah terbesar di dunia, yang terlihat dari banyaknya cadangan minyak yang dimiliki. PetroCaribe menjadi salah satu alat bagi Venezuela, khususnya Presiden Nicolas Maduro, dalam menarik dukungan dari negara – negara di Karibia. PetroCaribe juga memungkinkan Venezuela untuk memainkan peran dominan dalam OAS. Negara - negara anggota dari PetroCaribe meliputi negara - negara *Caribbean Community* (Caricom), yaitu organisasi negara-negara Karibia yang memiliki tujuan utama untuk mempromosikan integrasi ekonomi dan kerjasama di antara anggotanya, menjamin bahwa keuntungan integrasi regional dinikmati bersama, dan mengkoordinasikan kebijakan luar negeri.

PetroCaribe didirikan untuk negara-negara Karibia, karena wilayah Karibia merupakan wilayah yang memiliki nilai strategis tersendiri. Nilai strategis ini terletak pada adanya keanggotaan *Organization of American States* (OAS). Dengan demikian, apabila Venezuela berhasil memperoleh dukungan negara-negara Karibia melalui PetroCaribe, maka secara otomatis Venezuela akan mendapat dukungan dari OAS. Negara-negara Karibia mencakup separuh dari total suara di OAS dan seluruhnya memiliki keanggotaan dalam PBB. Dalam penggunaan PetroCaribe oleh Venezuela, dapat diidentifikasi kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi. Dalam aspek politik, dapat dilihat bahwa Venezuela berusaha melakukan penyebaran

“*newleft ideology*”, sedangkan dalam hal ekonomi terdapat kepentingan berupa pasar dan bantuan luar negeri. ”*New-left ideology*” yang dimaksud adalah ideologi Bolivarian, yang diambil dari nama figur nasionalis Simon Bolivar. Ideologi ini menghendaki beberapa poin:

1. Tatanan dunia yang multipolar dan tidak didominasi oleh aktor-aktor hegemonik seperti Amerika Serikat;
2. Penolakan terhadap kapitalisme yang selama ini dianut dan disebarakan oleh Barat, khususnya Amerika Serikat;
3. Kerja sama antara negara-negara Selatan atau South-South cooperation, yang bersifat kooperatif dan mendukung integritas kawasan;
4. Kerja sama antar negara yang dilandasi oleh prinsip solidaritas internasional.

Ideologi tersebut kemudian mengalami perkembangan dan ditambahkan dengan penggunaan kekuatan negara untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan memulihkan kegagalan pasar, serta penggunaan kekuatan negara untuk ikut serta dalam organisasi-organisasi regional maupun internasional untuk memperbaiki kesenjangan sosial dalam sistem internasional dan meningkatkan partisipasi politik. Selain penyebaran ideologi, terdapat pula kepentingan ekonomi yang menjadi alasan kuat dari dipertahankannya PetroCaribe.

Pada dasarnya, keputusan Maduro untuk mengatasi krisis ekonomi dengan berfokus kepada kebijakan-kebijakan sesuai dengan teori populisme sayap kiri seperti dukungan industri dalam negeri, dukungan tenaga kerja hingga mendukung perekonomian Venezuela, karena kebijakan tersebut sesuai dengan ideologi Maduro yang sosialis. Mengingat bahwa Maduro sejak dini telah diajarkan paham sosialis

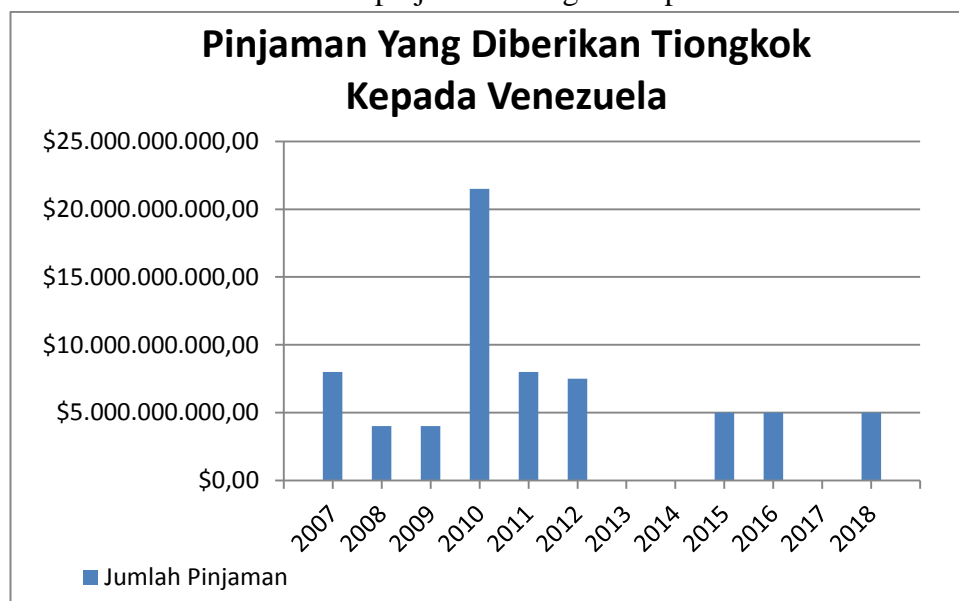
dan Maduro merupakan politikus didikan Hugo Chavez yang merupakan pembuat program PetroCaribe. Demi meningkatkan perindustrian migas di Venezuela, Maduro mempertahankan program PetroCaribe karena keputusan tersebut merupakan pilihan yang konsisten daripada alternatif lain. Keputusan ini jika dikaitkan dengan ciri-ciri populisme sayap kiri bahwa aktor pembuat kebijakan akan meningkatkan pengeluaran negara untuk menjalankan proyek sosialis yang sangat menguras APBN.

Maka diperlukan solusi untuk mendapatkan dana segar dan bahan pokok untuk menjalankan proyek tersebut demi menghadapi krisis ekonomi. Sehingga pilihan sentralitas fungsi minyak Venezuela dalam PetroCaribe merupakan tindakan yang terbaik bagi Maduro karena memiliki dua poin penting. Pertama, PetroCaribe berdampak positif terhadap indeks kumulatif Venezuela yang mencapai angka puluhan miliar, dengan transaksi yang lebih banyak menggunakan valuta asing (Cusack 2014), hal ini memperlihatkan bahwa PetroCaribe dapat memberikan keuntungan yang besar dari perdagangan internasional. Kedua, penghentian PetroCaribe akan memberikan dampak yang lebih buruk terhadap perekonomian Venezuela. Sistem pembayaran yang dapat diangsur dalam PetroCaribe dapat berubah ubah mengikuti harga minyak dunia. Hal ini memberikan potensi keuntungan yang lebih besar dan berlipat ganda bagi Venezuela. Selain itu, sistem barter pada proses transaksi dalam PetroCaribe berfungsi sebagai upaya pemerintah dalam menangani krisis yang ada, yakni permasalahan-permasalahan sosial akibat krisis seperti kemiskinan, kelaparan, dan penyakit sebagai dampak dari hiperinflasi yang terjadi. Oleh karena itu, Venezuela memerlukan bahan pokok untuk keberlangsungan hidup masyarakatnya.

b. Kerjasama *China-Venezuela Joint Fund*

Salah satu kesepakatan utang luar negeri yang paling penting dalam sejarah Amerika Latin lahir pada tahun 2007. *China-Venezuela Joint Fund* yang dibuat tahun itu oleh mendiang Chavez. Kerjasama ini terus dilanjutkan oleh Presiden Nicolas Maduro, yang berkuasa dari tahun 2013 hingga sekarang. Venezuela memungkinkan untuk menerima pinjaman dari Tiongkok dalam porsi hingga \$ 8 miliar dan membayarnya dengan pengiriman minyak (*Loan-for-oil*). Pinjaman ini bertujuan untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan proyek sosial Pemerintah Venezuela yang memungkinkan Venezuela untuk menerima pinjaman dari Tiongkok dalam porsi hingga \$ 5 miliar. *China-Venezuela Joint Fund* juga memungkinkan pemerintah Tiongkok untuk terlibat dalam produksi minyak di OOB (*Orinoco Oil Belt*), yang dianggap sebagai cadangan minyak terbesar di dunia (Al Jazeera, 2019).

Gambar 3.3. Grafik pinjaman Tiongkok kepada Venezuela

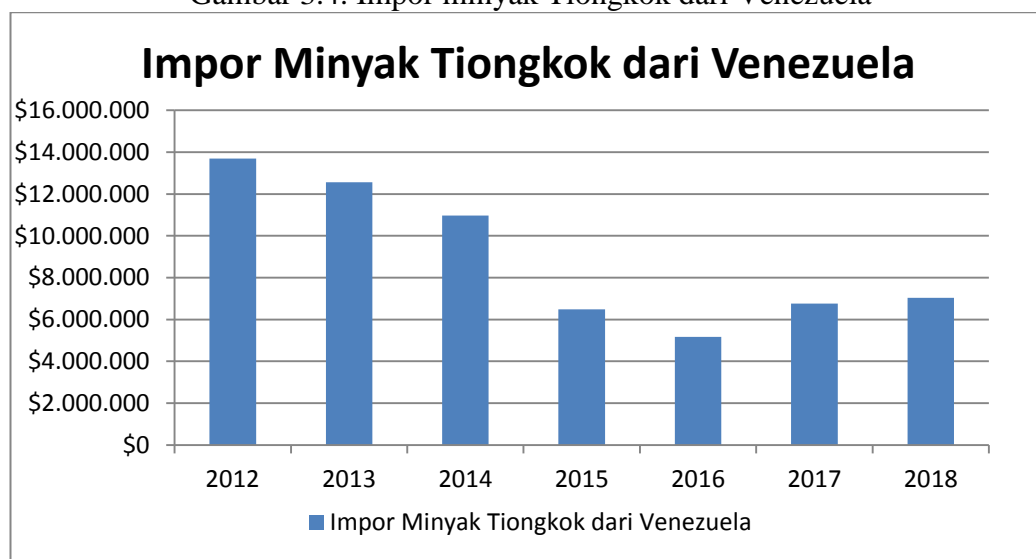


Sumber: diolah penulis

*Loan-for-oil* kepada Venezuela dari *China Development Bank* (CDB) umumnya menggunakan struktur pembayaran seperti berikut: pertama, perusahaan

minyak negara *Petróleos de Venezuela* (PDVSA) menjual minyak ke perusahaan minyak Tiongkok setara dengan harga minyak dipasaran global. Kedua, pembeli minyak di Tiongkok membayar uang pembelian untuk kargo minyak ke dalam akun yang dikendalikan oleh CDB. Terakhir, CDB mempertahankan jumlah yang dibutuhkan untuk melayani pinjaman (Collins, 2019). Kesepakatan pinjaman Venezuela yang dinegosiasikan pada 2007 oleh Bank Pembangunan Cina (CDB) dan *China Export-Import Bank* telah mendukung investasi di sektor energi dan pertambangan, termasuk pembangkit listrik, kilang minyak, dan jaringan pipa. Secara komersial, pinjaman bank kebijakan Tiongkok kepada Venezuela membantu membiayai operasional, biaya nasional, mendorong perusahaan untuk selalu mengedepankan energi sebagai sumber ekonomi utama dan berkomunikasi dengan pasar global untuk memenuhi permintaan kelas menengah Tiongkok yang meningkat. Beberapa perusahaan yang mendukung investasi ini termasuk *China Petroleum National Oil* (CNPC), Perusahaan Minyak dan Kimia Tiongkok (Sinopec), dan Grup Sinohydro (Dannreuther, 2011).

Gambar 3.4. Impor minyak Tiongkok dari Venezuela



Sumber: <https://wits.worldbank.org/>

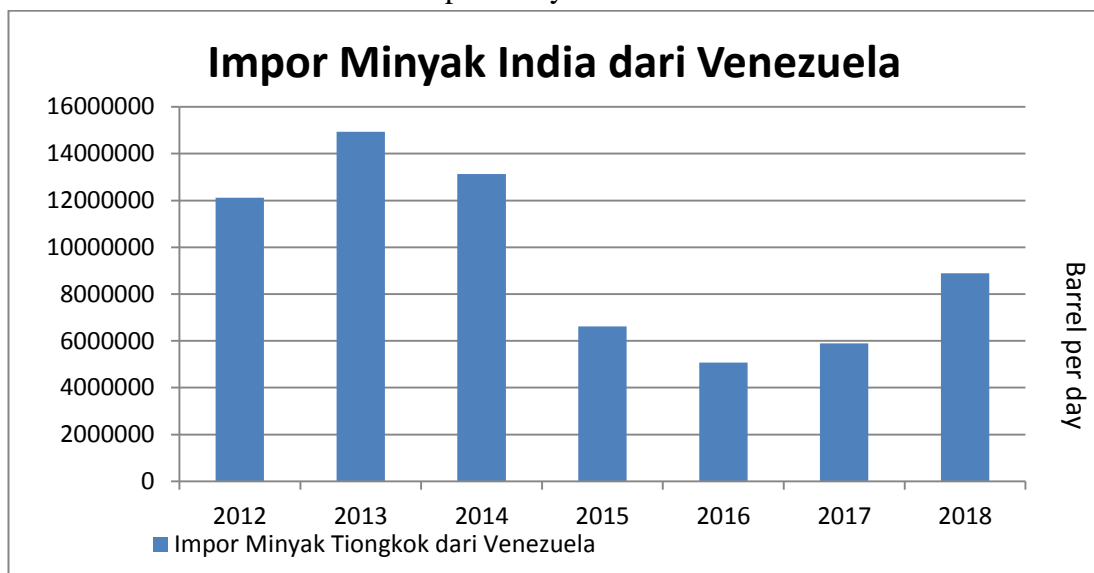
Hubungan Tiongkok-Venezuela dapat digambarkan dengan pola perdagangan, investasi, dan ikatan keuangan berbasis bahan baku. Venezuela merupakan negara dengan persediaan minyak bumi terbesar di dunia dengan 300,9 miliar barel sedangkan Arab Saudi memiliki jumlah cadangan minyak terbesar kedua di dunia dengan 266,5 miliar barel (WorldPopulationReview, 2019). Dengan demikian tampaknya Venezuela menjadi mitra yang sempurna untuk Tiongkok, yang saat ini menjadi importir minyak mentah terbesar di dunia. Bahkan ketika Venezuela telah turun ke dalam krisis, Tiongkok setidaknya secara resmi terus mendukung dan menjaga hubungan baik dengan Venezuela. Terlihat di grafik impor minyak mentah Tiongkok dari Venezuela merosot dan terendah di tahun 2016. Hal ini terjadi akibat penurunan ekspor dan produksi minyak akibat Venezuela tengah mengalami kesulitan untuk melakukan ekspor setelah berbagai sanksi ekonomi dari Amerika Serikat. Namun impor minyak Tiongkok dari Venezuela kembali meningkat karena adanya peningkatan permintaan dan kebutuhan Tiongkok di tengah pertumbuhan ekonominya sehingga meningkatkan ketergantungan impor. Keuntungan Venezuela melalui pinjaman, pola perdagangan, suntikan modal, dan dukungan teknis yang diberikan Tiongkok meliputi masuknya perusahaan-perusahaan Tiongkok pasca kebijakan-kebijakan pemenuhan kebutuhan minyak diterapkan, juga mendatangkan keuntungan tersendiri seperti: lahirnya ribuan lapangan pekerjaan baru; dibangunnya berbagai infrastruktur; dan berkurangnya impor Venezuela. Selain itu, skema kebijakan dalam konteks ini memberikan keuntungan dalam aspek domestik.

c. Menjalin hubungan ekonomi dengan India, Rusia dan Iran

Presiden Nicolas Maduro saat ini mengincar pasar Asia, dimana perusahaan minyak Venezuela PDVSA sedang menegosiasikan kesepakatan dagang yang baru.

Pemerintah AS melarang pembeli dari negara Amerika Serikat untuk membeli minyak dari Venezuela. Sanksi ini bertujuan agar Maduro tidak dapat menggunakan keuntungan penjualan minyak untuk mempertahankan kekuasaannya. Merespon sanksi tersebut, Maduro menyinggung tentang Tiongkok dan Iran serta Rusia yang terus mendukungnya. Ketiga negara itu merupakan peminjam terbesar Venezuela, mereka juga banyak beinvestasi di sektor minyak dan senjata selama bertahun-tahun.

Gambar 3.5. Impor Minyak India dari Venezuela



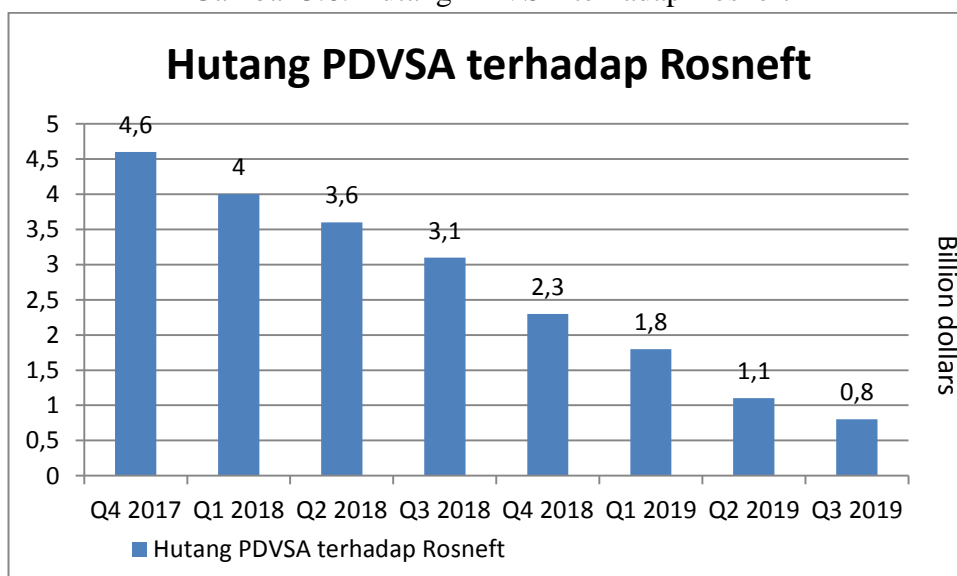
Sumber: <https://wits.worldbank.org/>

India adalah pembeli minyak Venezuela terbesar ketiga di dunia (EOI Caracas, 2020) India meningkatkan pembeliannya dari negara Amerika Latin dengan memanfaatkan momen AS yang menghentikan impor pengiriman minyak dari Venezuela. Apalagi perusahaan penyulingan India *Reliance Industries* dan *Nayara Energy* mendorong peningkatan impor tersebut. Hal ini memberikan jalur ekonomi baru kepada Presiden Nicolas Maduro. Venezuela pun telah mengirim menteri perminyakkannya, Manuel Quevedo, ke India untuk meyakinkan para penyuling untuk menggandakan lagi pembelian minyak mereka (Akurat, 2019). Sejak tahun 2016

Impor minyak India dari Venezuela melonjak, pada tahun 2018 sebesar 33,07% dari tahun sebelumnya. Venezuela juga sedang membuka pembayaran barter dengan India untuk mendorong penjualan minyak ke konsumen minyak terbesar ketiga dunia tersebut. Venezuela ingin membeli banyak produk termasuk obat-obatan dari India. Venezuela juga menawarkan kepada India diskon 30 persen untuk pembelian minyak mentah. Diskon tersebut hanya akan berlaku jika India menggunakan mata uang baru negara berbasis teknologi *blockchain* Petro. Kini mereka sedang mencari mekanisme pembayaran alternatif setelah penerapan sanksi ketat dari Amerika Serikat.

Rusia telah lama menjadi sekutu Venezuela, meskipun kegagalan pemerintah Maduro untuk membayar utangnya kepada kedua negara telah membuat hubungan ini tegang selama bertahun-tahun. Dengan perusahaan minyak milik negara Venezuela, PDVSA, memiliki utang sekitar \$ 4,6 miliar, dan pemerintah Maduro gagal membayar bunga atas pinjamannya yang lalu, utang nasional Venezuela sekarang lebih tinggi daripada PDBnya, dengan dua kreditur terbesar adalah Rusia dan China.

Gambar 3.6. Hutang PDVSA terhadap Rosneft



Sumber: <https://www.bloomberg.com>



Pada 2017, Rusia dan Venezuela menyepakati rencana pembayaran utang yang direstrukturisasi untuk membantu pemerintah Maduro dalam melunasi utangnya kepada negara (Gugerli, 2020). Dengan pemerintah Venezuela yang semakin tidak mampu membayar utangnya dalam menghadapi bencana ekonomi dan sanksi AS yang melumpuhkan, Maduro mengalami kesulitan yang lebih besar dalam mendapatkan pinjaman atau investasi baru dari Rusia dan China dalam beberapa tahun terakhir, dan baik Rusia maupun China tidak mengeluarkan pinjaman baru ke Venezuela. Namun, kedua negara tetap mengimpor minyak Venezuela sebagai bentuk pembayaran hutang. Pada 2019, perusahaan minyak negara Rusia Rosneft mengimpor 503.100 barel per hari, sekitar 62% dari total ekspor minyak Venezuela untuk tahun itu. Rusia juga terus berdagang makanan, obat-obatan, dan barang-barang lain yang langka di Venezuela dengan imbalan minyak, dalam banyak hal mengambil untung dari krisis kemanusiaan negara itu. Rusia memberi Venezuela lebih dari 250.000 ton biji-bijian pada 2018, dan 600.000 ton pada 2019, yang sebagian besar didistribusikan dalam paket makanan bersubsidi. Perusahaan farmasi Rusia juga diuntungkan; pada 2019, Venezuela menandatangani kontrak dengan perusahaan farmasi Rusia Gerofarm untuk memungkinkan pembelian dan impor insulin secara rutin ke Venezuela (BBC, 2019).

Venezuela beralih ke Iran untuk memenuhi kebutuhan minyak buminya. Venezuela memiliki cadangan minyak yang besar, tetapi krisis ekonomi yang berkepanjangan membuat negara ini menghadapi kekurangan bahan bakar yang parah. Presiden Venezuela Nicolas Maduro menggunakan bantuan Iran, dan dilaporkan Maduro berjanji akan membayar BBM dengan emas. Iran pun dengan senang hati menjual minyak buminya karena Iran juga tengah ditekan sanksi ekonomi super ketat dari AS. Pada tahun 2020, Iran akan menyediakan 1,53 juta

barel BBM. Presiden Venezuela Nicolas Maduro disebut berjanji membayar BBM Iran dengan emas (Detiknews, 2020). Sejumlah sanksi AS melarang Iran untuk menjual BBM dan juga menjatuhkan sanksi pada ekonomi Venezuela, termasuk perusahaan minyak milik negara, sebagai bagian dari upaya untuk membuat Maduro mundur dari kekuasaannya. Masuk akal bagi Iran untuk mengambil risiko dengan pengiriman ini karena Iran juga sangat membutuhkan pendapatan karena sanksi. Kapal tanker Iran yang berlayar ke Venezuela sangat penting karena pengiriman ini adalah satu-satunya pasokan BBM dalam jangka pendek. Maduro akan membuka rute pasokan dan menyelamatkan dirinya dari krisis bahan bakar saat ini. Iran demi mendukung ekonomi sekutunya, mengirim lima kapal tanker yang mengangkut bahan bakar melalui Selat Gibraltar dan perairan bebas ke Caracas dikawal dengan angkatan laut Venezuela (BBC, 2020).

Kerjasama antar negara seperti *China-Venezuela Joint Fund* hingga menjalin hubungan ekonomi dengan India, Rusia dan Iran, memberikan pemasukan dan modal bagi Venezuela untuk melanjutkan program-program sosial Maduro. Berlangsungnya program-program sosial sangat penting karena, menurut teori populisme sayap kiri, untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi akibat krisis, aktor politik akan berusaha mendistribusikan kekayaan atau pendapatan negara kepada masyarakat terutama kelas bawah dengan cara berfokus kepada pembuatan lapangan pekerjaan hingga memberikan program sosial seperti subsidi. *China-Venezuela Joint Fund* memberi dukungan kepada Venezuela meliputi masuknya perusahaan-perusahaan Tiongkok sehingga mendatangkan keuntungan seperti lahirnya ribuan lapangan pekerjaan baru. Kerjasama dengan India yang memberikan keuntungan bagi Venezuela dari hasil penjualan minyaknya hingga berencana untuk membeli obat-obatan dari India dengan sistem pembayaran *barter* minyak demi

tersedianya kebutuhan obat-obatan di Venezuela. Kerjasama dengan Rusia untuk merestrukturisasi sistem pembayaran hutang untuk membantu pemerintah Maduro dalam melunasi utangnya kepada Rusia, juga berdagang barang-barang pokok untuk kebutuhan subsidi dengan imbalan minyak. Serta, kerjasama dengan Iran untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar Venezuela akibat sanksi dari AS. Kerjasama ini sangat penting karena pengiriman ini adalah satu-satunya pasokan bahan bakar dalam jangka pendek. Maduro akan membuka rute pasokan dan menyelamatkan dirinya dari krisis bahan bakar.

Selain itu, keputusan Maduro untuk melakukan kerjasama luar negeri merupakan sebuah alternatif kekuatan ekonomi dan politik yang dibutuhkan Venezuela karena Maduro sedang berusaha membatasi hubungannya dengan Amerika Serikat sebagai negara *superpower* dan institusi-institusi keuangan seperti IMF dan *World Bank* dengan menolak bantuan dari mereka. Keputusan tersebut rasional bagi Maduro karena ia menuduh dua lembaga finansial tersebut memberikan iming-iming bantuan padahal bantuan tersebut sebenarnya merupakan mekanisme kapitalis-neoliberal Amerika Serikat untuk mengeksploitasi Venezuela, karena dalam syarat menerima bantuan, Venezuela diharuskan menjalankan pra-syarat yang tertuang dalam *Structural Adjustment Program* (SAP) seperti liberalisasi pasar. *World Bank* akan memberikan modal apabila sudah mendapatkan persetujuan IMF. Bagi Maduro, lembaga-lembaga finansial tersebut hanya mengulurkan bantuan kepada negara-negara yang sedang terpuruk perekonomiannya dengan mengajukan syarat-syarat yang hanya menguntungkan negara-negara pemegang saham terbesar di IMF dan *World Bank* yaitu negara industri maju seperti Amerika Serikat. Keadaan ini dimanfaatkan oleh perusahaan asing atau MNC dengan cara memberi bantuan melalui penanaman modal asing atau dengan penggabungan perusahaan yang memberi modal. Setelah menerima modal, perusahaan-perusahaan di Venezuela tidak mampu mengembalikan pinjaman, sehingga perusahaan tersebut harus menyerahkan

perusahaannya pada investor (Sprague, 2008). Sehingga kerjasama dengan menjalin hubungan dengan negara lain merupakan pilihan alternatif terbaik dibandingkan dengan meminta bantuan dengan *IMF* dan *World Bank*.

### **3.1.2. Diversifikasi Ekonomi**

Upaya yang diterapkan pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi yaitu pemerintah kini fokus menggiatkan diversifikasi ekonomi dengan tidak hanya bergantung pada komoditas minyak saja tetapi sedikitnya terdapat 15 sektor penggerak lainnya yang ikut dijadikan penggerak roda perekonomian Venezuela. Beberapa sektor penggerak ekonomi Venezuela antara lain yaitu farmasi, industri, petrokimia, pariwisata, telekomunikasi, hingga pertanian. Kemudian perkebunan Venezuela juga tidak kalah unggul dimana antara lain yaitu cokelat, tebu, kopi, hingga tembakau. Beragam hasil perkebunan buah pun melimpah di negara Venezuela tersebut seperti pepaya, alpukat, jeruk, pisang, nanas, hingga anggur. Setelah adanya situasi krisis di Venezuela pemerintah mengambil keputusan untuk menggiatkan diversifikasi ekonomi (Detik, 2017).

Sektor pertanian mewakili 5% dari PDB Venezuela dan mempekerjakan 7,1% dari populasi aktif. Produk pertanian utama negara ini adalah jagung, kedelai, tebu, beras, kapas, pisang, sayuran, kopi, coklat, daging sapi dan daging babi, susu, telur, dan ikan. Namun, Venezuela menikmati sumber daya alam yang penting, seperti minyak bumi (sumber daya alam utama mereka), gas, tambang emas dan perak, bauksit dan berlian. Menurut OPEC, sumber daya minyak bumi yang terbukti di negara itu akan mencapai 302.809 juta barel yang menempatkannya di tempat pertama di dunia di depan Arab Saudi.

Sektor industri mewakili 37,2% dari PDB dan mempekerjakan 21,1% dari populasi aktif. Kegiatan industri utama berputar di sekitar sektor perminyakan - yang dikendalikan oleh perusahaan negara, dan mewakili kekayaan alam pertama negara tersebut. Selain itu,

industri penting lainnya adalah peralatan konstruksi, makanan, tekstil, besi, baja, aluminium dan perakitan suku cadang mesin. Namun, karena kontrol Negara atas mata uang dan harga negara, industri lokal mengalami kesulitan untuk mendapatkan barang yang diperlukan untuk mempertahankan operasi atau untuk menjual barang dengan keuntungan di pasar lokal.

Sektor jasa mewakili 52,6% dari PDB dan mempekerjakan 71,8% dari populasi aktif, menjadikannya sumber utama pendapatan dan pekerjaan (Llyods Bank, 2020). Sektor ini mencakup perbankan dan keuangan, real estat, pendidikan, kedokteran, lembaga pemerintah, hotel dan restoran, serta hiburan. Bersama-sama, kegiatan ini mewakili lebih dari dua pertiga dari total pekerjaan di Venezuela.

## **3.2. Dukungan Tenaga Kerja**

### **3.2.1. Peningkatan upah minimum**

Menurunnya perekonomian di Venezuela menggiring negara tersebut pada meningkatnya tingkat kemiskinan dan kelaparan merata. Naiknya harga kebutuhan pokok dan kelangkaan barang pangan menjadi penyebab utama kelaparan yang dihadapi rakyat Venezuela. Mayoritas rakyat Venezuela sekitar 87 persen, menyatakan bahwa mereka tidak memiliki uang untuk membeli makanan yang layak. Persentase tersebut berdasarkan pada penelitian standar hidup layak yang disurvei oleh Simon Bolivar University (Kompas, 2016). Pemerintah berusaha meringankan beban warga agar mampu membeli kebutuhan mereka dengan mengeluarkan kebijakan menaikkan pendapatan minimum.

Pemerintah Venezuela menaikkan upah minimum untuk meringankan beban masyarakat di tengah krisis ekonomi. Langkah ini diumumkan Presiden Nicolas Maduro sebagai salah satu strateginya mengatasi dampak inflasi yang mencekik masyarakat. Keputusan tersebut telah konsisten dengan arah kebijakan Nicolas Maduro yang behaluan

sosialis demi mensejahterakan rakyat. Tidak ada pekerja di Venezuela yang dapat dibayar kurang dari tingkat upah minimum wajib ini. Pengusaha di Venezuela yang gagal membayar Upah Minimum dapat dikenakan hukuman dari pemerintah Venezuela.

Tabel 3.1. Upah minimum Venezuela

Tahun	Upah Minimum (USD)	Upah Minimum Venezuela
2014	776 US\$	4.889 B
2015	48,28 US\$	9.649 B
2016	101,17 US\$	65.056 B
2017	32,19 US\$	250.531 B
2018	6.13 US\$	1.307.646 B
2019	7,5 US\$	150.000 BS
2020	4 US\$	800.000 BS

Sumber: diolah penulis

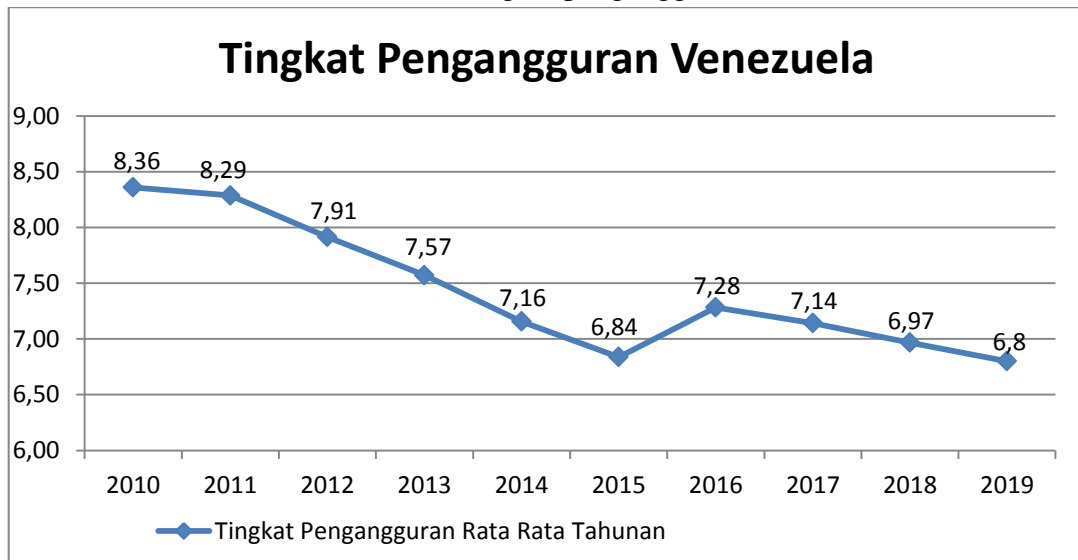
Keputusan tersebut merupakan serangkaian kenaikan upah minimum seiring dengan merosotnya nilai mata uang Venezuela. Meski upah naik secara signifikan, namun harga pangan, barang dan obat-obatan di negara penghasil minyak tersebut meroket. Untuk menghadapi berbagai kenaikan harga, Maduro telah menaikkan upah minimum, tapi inflasi dengan cepat meningkat dengan nilai mata uang bolivar yang turun drastis. Upah minimum Venezuela terus meningkat dari waktu ke waktu. Tahun 2014 nilai upah minimum masih berada dibawah 5000 bolivar namun, pada tahun 2018 upah minimum sudah meningkat tajam menjadi 1.307.646 bolivar. Bahkan Pemerintah Venezuela menerapkan kebijakan redenominasi mata uang Bolivar dan merubah nama mata uang Venezuela menjadi *Bolivar Soberano* (Bolivar Berdaulat) yang pada dasarnya memangkas nilai lima angka nol dari harga yang ada. Angka yang terlihat sangat tinggi tetapi sebenarnya hal itu tidak mencukupi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dikarenakan peningkatan inflasi yang cepat.

### 3.2.2. Akses pekerjaan untuk kaum muda Venezuela

Upaya berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Venezuela yang rentan di tengah krisis ekonomi. Pada 7 Oktober 2014, Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyetujui undang-undang yang bertujuan untuk memastikan akses ke pekerjaan bagi kaum muda di Venezuela. Presiden Maduro berjanji akan menciptakan 200.000 pekerjaan untuk para pemuda, serta melindungi hak-hak pekerja dan jaminan sosial mereka. Undang-undang tersebut berjudul Undang-Undang Ketenagakerjaan Untuk Kaum Muda Produktif memungkinkan kaum muda memiliki akses ke sumber daya ekonomi yang lebih besar dan kemampuan untuk mengembangkan usaha mereka sendiri. Undang-undang tersebut disahkan pada saat perayaan kemenangan pemilihan umum Venezuela tahun 2012 yang dimenangkan Hugo Chavez yang dihadiri oleh aktivis muda (Venezuela Analysis, 2014). Undang-undang ini akan membantu menciptakan jenis pekerjaan yang berbeda dengan ekonomi neoliberal, dan fokus pada menghasilkan pekerjaan "sosio-produktif", atau pekerjaan yang memiliki nilai sosial bagi rakyat Venezuela, meningkatkan mata pencaharian serta memperkuat upaya untuk mendiversifikasi dan mengembangkan ekonomi Venezuela di luar minyak. Pekerjaan itu termasuk dalam program anti-kemiskinan pemerintah yang dikenal sebagai "*mission*".

Tidak hanya itu, Presiden Maduro juga mengkonfirmasi pembentukan Dana Proyek Nasional untuk Pemuda Produktif di tahun 2014 yang didirikan dengan pembayaran awal sebesar 500 juta Bolivar (saat itu US\$ 79 Juta). Dana pembangunan dirancang khusus untuk membiayai proyek-proyek sosial-produktif yang diusulkan oleh kaum muda (Telesur, 2014). Dana tersebut akan membiayai proyek-proyek seperti layanan untuk masyarakat, bengkel pemuda, perbaikan sepeda motor dan proyek pertukangan serta memberikan bantuan ekonomi untuk serangkaian proyek budaya, termasuk studio rekaman dan acara radio pemuda di berbagai daerah.

Gambar 3.7. Grafik tingkat pengangguran Venezuela



Sumber : *Trading Economics* (2020)

Pemerintah Venezuela memberikan akses pekerjaan kepada kaum muda dengan mengesahkan Undang Undang tentang Ketenagakerjaan dan pembentukan Dana Proyek Nasional untuk Pemuda Produktif karena untuk menurunkan tingkat pengangguran di tengah krisis ekonomi Venezuela. Langkah ini diumumkan Presiden Nicolas Maduro sebagai salah satu strateginya mengatasi dampak krisis yang menyebabkan banyak perusahaan tutup akibat inflasi. Keputusan tersebut telah konsisten dengan arah kebijakan Nicolas Maduro yang behaluan sosialis demi mensejahterakan rakyat dengan memudahkan akses menuju lapangan pekerjaan. Selanjutnya, tingkat pengangguran di Venezuela berdasarkan data *Trading Economics* (2020) terlihat bahwa tingkat pengangguran bersifat fluktuatif cenderung turun dari tahun 2010 sampai 2019. Pemerintah Venezuela menyatakan bahwa undang-undang tersebut dapat menciptakan peluang lapangan sekitar 200.000 pekerjaan baru. Undang-undang tersebut merupakan bagian dari model demokrasi partisipatif baru di Venezuela, dan merupakan produk dari proses konsultasi nasional dengan pemuda yang mengumpulkan proposal di universitas, komunitas, sekolah, dan gerakan pekerja muda di seluruh daerah.



### **3.3. Intervensi Negara Dalam Perekonomian**

#### **3.3.1. Menerapkan mata uang digital Petro**

Petro merupakan mata uang kripto (*cryptocurrency*) atau mata uang digital berbentuk token yang diprakarsai dan dikembangkan oleh pemerintah Venezuela. Ide terkait mata uang petro ini sebenarnya digagas oleh Hugo Chavez, yaitu presiden Venezuela sebelumnya. Tetapi, sampai akhir hidupnya, Hugo Chavez belum berhasil mewujudkannya. Meskipun pemimpin pemerintahan telah berganti, ide mengenai petro sebagai mata uang kripto dinilai mampu menyajikan dampak positif bagi kedaulatan moneter Venezuela. Karena itu, ide tersebut selanjutnya diwujudkan oleh Nicolas Maduro, sebagai pemimpin pemerintah selanjutnya.

Petro secara resmi disampaikan pada Desember 2017 dan diluncurkan pada Februari 2018. Peluncuran petro ini bertujuan sebagai pelengkap dari mata uang bolivar yang nilai tukarnya menurun karena dampak dari krisis ekonomi. Saat menghadapi krisis ekonomi yang sangat parah, Venezuela diberikan sanksi keuangan dari Amerika Serikat. Donald Trump, sebagai presiden Amerika Serikat melarang warga negaranya baik individu maupun perusahaan untuk melakukan transaksi dengan Venezuela, terutama yang berhubungan dengan perdagangan minyak dan pemberian pinjaman. Dalam menangani sanksi keuangan dari Amerika Serikat, Venezuela selanjutnya meluncurkan mata uang kripto bernama petro (Forbes, 2018) dengan harapan mata uang petro tersebut, Venezuela dapat melakukan transaksi dan mendapatkan pinjaman luar negeri demi menambah anggaran negaranya guna mencukupi kebutuhan impor dan program program sosialnya.

Petro diharapkan mampu mengatasi sanksi keuangan dari Amerika Serikat, dikarenakan mata uang kripto ini bisa menggantikan dollar Amerika Serikat dalam setiap aktifitas perdagangan luar negeri. Petro yang dikembangkan oleh otoritas Venezuela hanya dapat dibeli dari pemerintah negara tersebut saja, yang mana pada pra penjualan dan

penawaran awal dilakukan dalam mata uang keras dan digital, tapi bukan dalam mata uang lokal bolivar. Dalam perkembangannya, petro dapat dimiliki oleh setiap warga negara dan perusahaan secara online melalui situs web khusus dengan mata uang yuan, rubel, lira, dan euro. Selanjutnya, petro juga dapat dibeli dengan mata uang kripto lainnya seperti bitcoin, dan etherium. Penetapan harga petro didasarkan pada harga minyak, di mana 1 petro setara dengan 1 barel minyak. Tidak seperti mata uang digital lainnya, petro tidak perlu ditambang karena sudah memiliki nilai; ia dilindungi dengan kekayaan minyak dan pertambangan Venezuela. Sementara harga minyak Venezuela ditetapkan oleh Kementerian Minyak dan Pertambangan Venezuela yang saat ini mencapai 60 dollar Amerika Serikat per barel. Sehingga, 1 unit petro dihargai senilai 60 dollar Amerika Serikat. Sebagai mata uang kripto, petro dapat ditukar melalui lembaga penukaran virtual. Selain itu, petro juga dapat dipakai sebagai alat pembayaran yang sah untuk mengakses layanan dan membeli barang serta jasa yang disajikan oleh pedagang-pedagang yang telah bekerjasama dengan pemerintah.

### **3.3.2. Meredenominasi mata uang Bolivar Fuerte menjadi Bolivar Soberano**

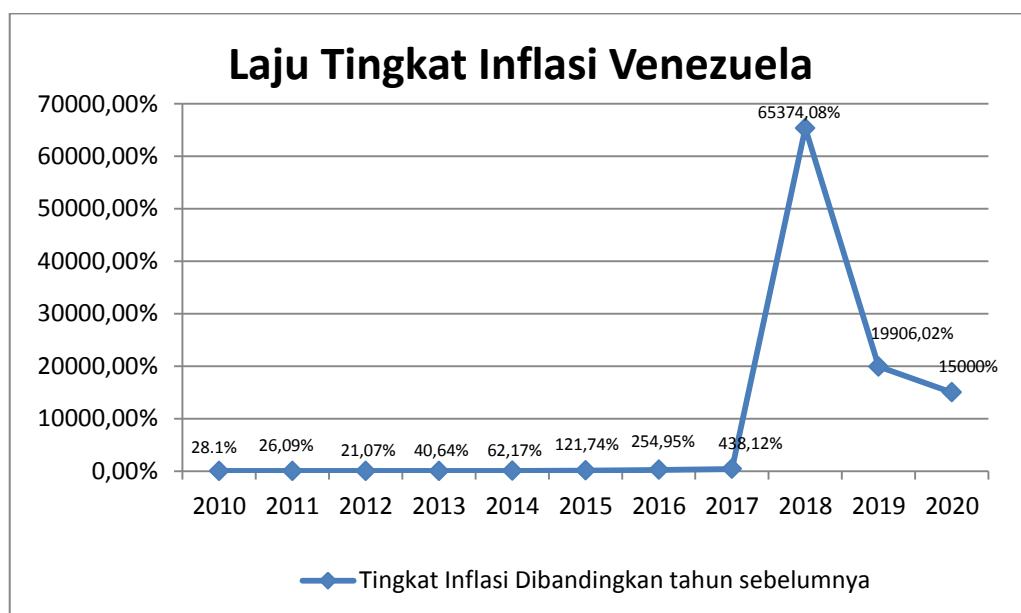
Venezuela mengeluarkan kebijakan redenominasi mata uang pada Pada 20 Agustus 2018 dalam upaya untuk meningkatkan kinerja perekonomiannya yang berantakan ketika Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bahwa inflasi dapat mencapai satu juta persen tahun 2019. Langkah itu, bagian dari langkah-langkah dramatis yang bertujuan menghadapi hiperinflasi yang tak terkendali, terjadi ketika ribuan warga Venezuela terus melarikan diri melintasi perbatasan ke negara-negara tetangga di tengah kekurangan makanan dan obat-obatan, kekacauan politik dan meningkatnya angka kejahatan.

Presiden Nicolás Maduro mengumumkan program reformasi moneter baru, yaitu meluncurkan mata uang baru yang bernama Bolivar Soberano (Bolivar Berdaulat) yang

menggantikan mata uang venezuela yang lama, tetapi hanya meredenominasi lima angka nol dibelakang dari harga yang ada. Mata uang baru tersebut bernilai 100.000 Bolivar Fuerte dan telah diluncurkan uang kertas dalam denominasi 2, 5, 10, 20, 50, 100 dan 200. Ini merupakan strategi pemerintahan Presiden Venezuela untuk menghadapi laju inflasi yang sudah semakin parah.

Berdasarkan data yang diterbitkan dari Statista (2020), tingkat inflasi di Venezuela dari tahun ke tahun meningkat dengan cepat. Kondisi ini terus memburuk dari tahun 2010 hingga 2018 dengan peningkatan tertinggi 65.374,08%, walaupun percepatan inflasi sempat menurun sampai tahun 2020 hingga 15.000% angka tersebut masih terbilang sangat tinggi. Bank sentral menyatakan upaya ini dilakukan guna membuat sistem pembayaran lebih efisien. Pemerintah melakukan tindakan ini untuk memaksa masyarakatnya menukarkan mata uang yang mereka simpan sehingga mata uang nasional tidak ditukarkan melalui pasar gelap. Selain itu untuk penyederhanaan perhitungan dengan mengoperasikan transaksi dalam jumlah tanpa nol ekstra menjadi lebih sederhana dan nyaman.

Gambar 3.8. Grafik tingkat inflasi Venezuela



Sumber : Statista (2020)

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa redenominasi juga merupakan langkah tambahan untuk memperkuat mata uang nasional. Redenominasi hanyalah alat bantu untuk meningkatkan perekonomian, yang memungkinkan untuk meredakan dampak krisis dan hiperinflasi. Tugasnya adalah memulihkan kepercayaan pada mata uang nasional, menyederhanakan penyelesaian, dan mengendalikan perputaran uang yang beredar (Lite Forex, 2020). Jika dihubungkan dengan kebijakan Maduro yang diluncurkan di tahun 2018, yaitu kebijakan mata uang baru Bolivar Soberano dan kebijakan penggunaan *cryptocurrency* Petro dalam bertransaksi, terbukti bahwa kebijakan tersebut dapat menekan tingkat inflasi walaupun masih pada angka peningkatan yang masih signifikan.

### **3.4. Alasan Maduro Menjalankan Kebijakan Sosialis Populis**

#### **3.4.1. Meningkatkan legitimasi kekuasaan Maduro**

Pada masa pemerintahan Nicolas Maduro, Venezuela berada dalam kondisi krisis. Krisis dapat dilihat dari kondisi ekonomi dan sosial yang buruk, apalagi saat ini legitimasi Maduro telah menurun akibat Juan Guaido dari oposisi yang mengklaim dirinya sebagai presiden sementara. Keadaan ini berimbas pada kepercayaan masyarakat terhadap Nicolas Maduro sangat rendah. Di tengah situasi demikian, Nicolas Maduro menerapkan kebijakan kebijakan sosialis yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya untuk menghadapi krisis ekonomi sekaligus untuk mengatasi krisis legitimasi terhadap dirinya pada masyarakat. Demi meningkatkan legitimasinya ia menerapkan kebijakan sosialis, pada skala internasional, Nicolas Maduro memanfaatkan kerjasama *China-Venezuela Joint Fund* dan program PetroCaribe serta menjalin hubungan luar negeri dengan negara lain untuk menyediakan pemasukan negara bagi berlangsungnya program-program sosialis Maduro.

Sedangkan pada skala domestik, Nicolas Maduro melakukan peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat, seperti menaikkan upah minimum pekerja dan menambah

lowongan pekerjaan untuk menunjukkan program sosialis Maduro berjalan dengan baik. Selain itu, alasan Maduro menerapkan populis sayap kiri dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat adalah karena Nicolas Maduro sedang mempersiapkan diri untuk pencalonan Pemilu 2018 di Venezuela demi mendapatkan dukungan masyarakat kelas bawah, Maduro memenangkan pemilu dengan persentase suara 68%, dukungan tersebut mayoritas dari golongan masyarakat miskin, yang mendapatkan manfaat dari program sosial yang didanai oleh pemerintah Venezuela. Namun setelah Pemilu tersebut diadakan, tingkat partisipasi masyarakat yang mengikuti pemilu hanya sebesar 46,7% sangat jauh ketimbang tingkat partisipasi pada Pemilu 2013 sebesar 80%. Walaupun begitu Maduro tetap memenangkan pemilu tersebut dan melanjutkan Revolusi Bolivarian yang dibawa oleh pendahulunya.

### **3.4.2. Menjaga identitas negara Venezuela sebagai negara bolivarian**

Identitas negara merupakan suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain, dikarenakan ciri khas suatu bangsa terletak pada konsep bangsa itu sendiri. Keberhasilan Pemilu 1998 oleh Hugo Chavez telah merubah identitas Venezuela melalui revolusi Bolivariannya. Revolusi Bolivarian diambil dari nama Simón Bolívar, seorang pemimpin revolusioner Venezuela dan Amerika Latin pada awal abad ke-19, yang terkenal dalam Perang Amerika-Spanyol dalam menggapai kemerdekaan sebagian besar Amerika Selatan dari kekuasaan Spanyol. Negara yang sebelumnya sangat tergantung dengan arah kebijakan perekonomian kapitalis-neoliberal segera diubah Chavez melalui "Revolusi Bolivarian" yang program-program pembangunannya yang sosialis, bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Venezuela.

Di saat Hugo Chavez sedang berjuang melawan penyakit kankernya, Maduro merupakan salah satu yang sering terlihat mendampinginya. Chavez cukup lama menderita penyakit kanker, dan di bulan Maret tahun 2013, Chavez dinyatakan meninggal. Setelah

pengumuman meninggalnya, Maduro melangkah untuk menggantikannya, Maduro mengikuti pemilihan umum presiden Venezuela 2013 dan memenangkan 54% suara. Maduro adalah politikus haluan sayap kiri yang membawa program sosialis untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mengatur kontrol pemerintah terhadap lembaga negara maupun swasta serta media. Maduro dinilai memiliki citra Chavez karena sepanjang karir Nicolas Maduro, ia tumbuh dan hidup di lingkungan buruh serta diajari paham sosialisme sejak dini. Sebagai Presiden Venezuela, ia memutuskan untuk melanjutkan revolusi Bolivarian dan program nasionalisasi Venezuela. Hal ini dilakukan untuk menjaga identitas negara Venezuela sebagai negara bolivarian.

Revolusi Bolivarian adalah suatu revolusi, dimana massa berperan aktif dalam kancah politik dan berusaha untuk merubah nasibnya di tangan mereka sendiri, dan mengubah tatanan masyarakat dari bawah. Tapi revolusi ini belum selesai karena Revolusi Bolivarian belum berhasil mengambil alih kekuatan ekonomi secara tuntas. Selama masih ada dampak dari tekanan-tekanan ekonomi yang masih berlanjut maka, tidak bisa dikatakan bahwa revolusi ini berhasil (RMOL, 2018). Presiden Nicolas Maduro harus melaksanakan keinginan-keinginan masyarakat yang telah memilihnya, buruh dan petani, rakyat miskin serta kaum pemuda, dengan melawan tekanan-tekanan dari oposisi yang kontra terhadap revolusioner dan tekanan dari pihak asing.

Kemenangan Maduro dalam setiap pemilu 2013 dan 2018 menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Venezuela menginginkan keberlanjutan Revolusi Bolivarian. Hal ini perlu dilakukan demi menjaga revolusi Bolivarian yang dibawa Hugo Chavez untuk menghasilkan pemerintahan yang sosialis karena kelompok oposisi ingin mengakhiri revolusi Bolivarian. Kelompok oposisi juga mendapatkan dukungan yang kuat dari pihak asing terutama Amerika Serikat yang juga terganggu dengan program nasionalisasi industri Venezuela.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

Sebagai negara dengan persediaan minyak bumi terbesar di dunia, Pemerintah Venezuela yang mendapat keuntungan dari hal itu, memberikan sebagian besar pendapatannya untuk mendorong program-program pemerintah yang membutuhkan anggaran sangat besar untuk program-program sosialnya, tetapi sejak harga minyak dunia turun, efeknya sangat terasa berat terhadap negara tersebut. Kemudian kebijakan kontrol harga dan mata uang yang diterapkan pemerintah terhadap bahan-bahan kebutuhan dasar. Tujuan dasar yang baik supaya masyarakat miskin bisa mendapatkan kebutuhan mereka. Disisi lain juga bertujuan untuk mengurangi arus modal. Namun hal ini melahirkan pasar gelap dan maraknya terjadi korupsi. Hal ini terjadi karena ketimpangan yang sangat jauh dari harga pemerintah dan harga pada pasar gelap. Selain itu, kekacauan politik pasca kemenangan Nicolas Maduro selaku presiden pada pemilu tahun 2013 tidak diterima oleh pihak oposisi. Kelompok oposisi selalu berusaha melakukan tekanan terhadap pemerintahan Nicolas Maduro dengan melakukan demo dan mempengaruhi masyarakat untuk semakin menjauhi pemerintahan. Kelompok oposisi berupaya mengembangkan pandangan bahwa pemerintahan Maduro telah gagal dalam mengelola perekonomiannya sehingga masyarakat kesusahan. Respon Pemerintah Venezuela terhadap para demonstran cenderung otoriter dan banyak terjadi pelanggaran HAM sehingga banyak dikecam oleh dunia internasional. Sebagai bentuk kecaman dunia internasional, Amerika Serikat telah memberikan beberapa sanksi ekonomi kepada Venezuela. Sanksi ekonomi Amerika Serikat telah berdampak kepada menurunnya hasil industri minyak, penurunan

pertumbuhan GDP, menipisnya cadangan devisa, meningkatkan beban utang, perlambatan pertumbuhan perdagangan, hiperinflasi, dan melemahnya nilai tukar mata uang negara.

Kebijakan yang digunakan Maduro untuk menangani krisis ekonomi meliputi kebijakan-kebijakan yang mendukung industri dalam negeri seperti industri minyak dan gas. Cadangan minyak Venezuela terbukti mencapai 303 miliar barel sangat menjanjikan bagi pemerintah Venezuela untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Presiden Nicolas Maduro berkeinginan untuk menciptakan sistem multipolar internasional yang direalisasikan dengan menjalin solidaritas dan persahabatan antarnegara dengan program PetroCaribe. Selanjutnya, Presiden Nicolas Maduro tetap menjalankan kesepakatan utang luar negeri yaitu China-Venezuela Joint Fund yang memungkinkan Venezuela untuk menerima pinjaman dari Tiongkok dalam porsi hingga lima miliar dolar, dan membayar mereka dengan pengiriman minyak mentah. Selain itu, kebijakan yang digunakan Maduro untuk menangani krisis ekonomi juga melalui diversifikasi ekonomi antara lain yaitu pertanian, petrokimia, industri, pariwisata, telekomunikasi, hingga farmasi sehingga Pemerintah Venezuela dapat mengurangi pengaruh harga minyak turun.

Kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan dukungan terhadap pekerja juga merupakan salah satu kebijakan Presiden Maduro dalam mengatasi krisis ekonomi. Contohnya kebijakan menaikkan upah minimum, langkah ini dilakukan Pemerintah Venezuela untuk meringankan beban masyarakat di tengah krisis ekonomi. Selanjutnya upaya berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Venezuela yang rentan di tengah krisis ekonomi dengan meningkatkan akses pekerjaan untuk kaum muda Venezuela melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan Untuk Kaum Muda Produktif yang disahkan Presiden Nicolas Maduro. Presiden Maduro juga mengkonfirmasi pembentukan Dana Proyek Nasional untuk Pemuda Produktif yang memungkinkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan sekitar 200.000 pekerjaan baru. Hal ini dilakukan untuk menurunkan



tingkat pengangguran di Venezuela. Selain itu, kebijakan ekonomi yang diterapkan Presiden Maduro dengan menerapkan mata uang *crypto* yang bernama petro. Mata uang kripto diharapkan mampu menyajikan dampak positif bagi kedaulatan moneter Venezuela. Venezuela juga mengeluarkan kebijakan redenominasi mata uang bernama Bolivar Soberano yang bernilai 100.000 bolivar menggantikan mata uang Venezuela sebelumnya. kebijakan mata uang baru Bolivar Soberano dan kebijakan penggunaan *cryptocurrency* Petro dalam bertransaksi, dilakukan untuk menekan tingkat inflasi di Venezuela.

Alasan Presiden Nicolas Maduro tetap menerapkan kebijakan sosialis dan populis dalam menangani krisis ekonomi di Venezuela dikarenakan Presiden Nicolas Maduro ingin meningkatkan legitimasi kekuasaannya. Nicolas Maduro sedang mempersiapkan diri untuk pencalonan Pemilu 2018 di Venezuela demi mendapatkan dukungan masyarakat, terbukti Maduro memenangkan pemilu dengan persentase suara 68%, dukungan tersebut mayoritas dari golongan masyarakat miskin, yang mendapat manfaat dari program sosial yang bayar oleh pemerintah Venezuela. Selain itu Maduro ingin menjaga identitas negara Venezuela sebagai negara Bolivarian. Maduro adalah politikus haluan sayap kiri yang membawa program sosialis untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mengatur kontrol pemerintah terhadap lembaga negara maupun swasta serta media. Maduro juga memiliki citra Chavez sehingga sepanjang karir Nicolas Maduro sebagai Presiden Venezuela, ia tetap melanjutkan revolusi Bolivarian dan program nasionalisasi Venezuela.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan dari pembahasan yang telah penulis sajikan, maka penulis bermaksud untuk memberikan saran yang bermanfaat bagi arah kebijakan Nicolas Maduro dalam menghadapi krisis serta saran yang membangun bagi penelitian selanjutnya.

a. Saran bagi arah kebijakan Nicolas Maduro

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Maduro memprioritaskan kesejahteraan masyarakat berdampak pada stabilitas ekonomi dan keamanan negara menjadi terancam karena terjadinya defisit anggaran. Maka diperlukan keseimbangan antara alasan Maduro dalam menerapkan kebijakan sosialis-populis dengan dampak kebijakan *deficit spending* yang memfokuskan pendapatan negara dialihkan ke subsidi masyarakat yaitu dengan menerapkan kebijakan *austerity* atau langkah-langkah penghematan anggaran dengan maksud untuk mengurangi defisit anggaran. Langkah-langkah penghematan dapat berupa kebijakan menaikkan pajak dan mengurangi pengeluaran belanja negara. Tindakan penghematan dapat menguatkan kerjasama internasional karena penghematan dilakukan membuat investor dari negara lain tertarik untuk berinvestasi, selain itu juga Venezuela dapat menciptakan peluang kerja sama pinjaman modal dengan negara lain, karena kebijakan penghematan dapat meningkatkan kepercayaan kreditor akan kemampuan negara penerima untuk memenuhi kewajiban hutangnya.

b. Saran bagi penelitian selanjutnya

Skripsi ini memang diakui mempunyai banyak kekurangannya yang berhubungan dengan penjelasan yang kurang rinci dalam beberapa unit analisis. Selain itu juga masih belum dibahas kaitannya dengan pandemi Covid-19 yang sedang terjadi terhadap krisis ekonomi di Venezuela. Kekurangan penelitian tersebut dapat menjadi gagasan lain untuk penelitian selanjutnya. Pada kenyataannya, skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, demi meningkatkan kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Aytaç, S. Erdem & Öniş, Ziya. (2014). Varieties of Populism in a Changing Global Context: The Divergent Paths of Erdoğan and Kirchnerismo. *Comparative Politics*, 41 – 59.
- Barr, Robert R. (2009). Populists, Outsiders and Anti-establishment Politics. *Party Politics*, 15 (1), 29 - 48.
- Cerra, Valerie. (2016). Inflation and the Black Market Exchange Rate in a Repressed Market: A Model of Venezuela. *IMF Working Paper*. 1 – 49.
- Cusack, A. K. (2014). Protests, Polarisation, and Instability in Venezuela, *Caribbean Journal of International Relations & Diplomacy*, 2(1), 99-111.
- Dachevsky, K & Kornbilit, J. (2016). The Reproduction and Crisis of Capitalism in Venezuela under Chavismo. *Latin American Perspectives*, 44 (1), 78 – 93.
- Dannreuther, R. (2011). China and global oil: Vulnerability and Opportunity. *International Affairs* 87(6), 1345–1364.
- Jacome, F. (2011). PetroCaribe: The Current Phase of Venezuela’s Oil Diplomacy in The Caribbean. *Programa de Cooperacion en Seguridad Regional*. 40, 1-10.
- John, M. (2018). Venezuelan economic crisis: crossing Latin American and Caribbean borders. *Journal Migration and Development*, 8 (3), 1 - 11.
- Maya, M, L. (2014). Populism, 21st-century socialism and corruption in Venezuela. *Thesis Eleven*. 40 (4) 68 - 87.

### Buku-Buku

- Anggito, A & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Auty, Richard M. 1993. *Sustaining Development in Mineral Economies: The Resources Curse Thesis*. Routledge. London.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Esping-Andersen, Gosta. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton NJ: Princeton University Press.

- Levitsky, Steven & Roberts, Kenneth M. (2011). *The Resurgence of the Latin American Left*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Moleong, Lexy, J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muller, Jan-Werner. (2016). *What Is Populism?*. Philadelphia, PA. University of Pennsylvania Press.
- Nurani Soyomukti. (2007). *Revolusi Bolivarian Hugo Chavez dan Politik Radikal*. Yogyakarta: Resist Book.
- Nurdin, I & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Prasetyantoko. A. (2009). *Krisis Finansial Dalam Perangkap Ekonomi Neoliberal*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

### **Artikel**

- Akurat. (2019). *India Beli Minyak Besar-besaran dari Venezuela, Manfaatkan Sanksi AS*. Diakses pada tanggal 24 September 2020 dari <https://akurat.co/id-531769-read-india-beli-minyak-besarbesaran-dari-venezuela-manfaatkan-sanksi-as>.
- Al-Jazeera. (2019). *Venezuela in crisis: How did the country get here?*. Diakses pada 10 Januari 2020, dari <https://www.aljazeera.com/news/2019/01/venezuela-crisis-country-190117184349473.html>.
- Al-Jazeera. (2015). *Venezuela Opposition Wins Majority in Legislature*. Diakses pada tanggal 12 April 2020 dari <http://www.aljazeera.com/news/2015/12/opposition-wins-majority-venezuela-legislature-151207051359021.html>.
- Al-Jazeera. (2014). *Venezuelan Anti-Government Protests Turn Violent*. Diakses pada tanggal 17 April 2020 dari <http://america.aljazeera.com/articles/2014/2/12/venezuelan-anti-governmentproteststurnviolent.html>.
- Al-Jazeera. (2019). *China will Determine the Future of Venezuela*. Diakses pada tanggal 27 April 2020 dari <https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/chinadetermine-future-venezuela-190709143930431.html>.
- BBC. (2014). *What lies behind the protests in Venezuela?*. Diakses pada 10 Maret 2020, dari <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-26335287>.
- BBC. (2018). *Mata Uang Bolivar Baru Diluncurkan, Venezuela Lumpuh*. Diakses pada tanggal 11 April 2020 dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45279358>.

- BBC. (2013). *Maduro Menang Pemilu Presiden Venezuela*. Diakses pada tanggal 15 April 2020 dari [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/04/130415\\_nicolas\\_maduro\\_menang\\_pemilu](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/04/130415_nicolas_maduro_menang_pemilu).
- BBC. (2015). *Kubu oposisi Venezuela Gusur Partai Sosialis di Parlemen*. Diakses pada tanggal 18 April 2020 dari [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/151207\\_dunia\\_venezuela\\_oposisi\\_parlemen](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/151207_dunia_venezuela_oposisi_parlemen).
- BBC. (2019). *Krisis Venezuela: Dari Rusia sampai Turki, mengapa banyak negara mengamati nasib Presiden Maduro?*. Diakses pada tanggal 26 September 2020 dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47401020>.
- BBC. (2020). *Konflik AS-Iran: Pengiriman tanker minyak ke Venezuela yang menjadi sumber ketegangan baru dua negara*. Diakses pada tanggal 28 September 2020 dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52765073>.
- Berdikasionline. (2013). *Kemenangan Nicolas Maduro Dan Tantangan Revolusi Bolivarian*. Diakses pada tanggal 15 April 2020 dari <https://www.berdikarionline.com/kemenangan-maduro-dan-tantangan-revolusi-bolivarian>.
- Bloomberg. (2020). *Sanctions-Free Rosneft Affiliate Boosts Venezuela Oil Exports*. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 dari <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-24/sanctions-free-rosneft-affiliate-boosting-venezuelan-oil-exports>.
- Breitbart. (2014). *Venezuela Seals Border With Colombia to Fight Smuggling*. Diakses pada tanggal 23 April 2020 dari <https://www.breitbart.com/news/7e9d45bf-081f-4bc2-8db5-4c6b5b108398/>.
- British Petroleum. (2019). *BP Statistical Review of World Energy: 2019*. Diakses pada tanggal 26 April 2020 dari <https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf>.
- Ceicdata. (2020). *Venezuela Minyak Mentah: Ekspor*. Diakses pada tanggal 21 April 2020 dari <https://www.ceicdata.com/id/indicator/venezuela/crude-oil-exports>.
- CNBC. (2019). *Venezuelan Government Could Topple On Its Own, Even Without New U.S. Sanctions, Economists Say*. Diakses pada tanggal 21 April 2020 dari <https://www.cnbc.com/2019/01/24/venezuelan-government-could-topple-on-its-own-even-without-new-us-sanctions-economists-say.html>.
- CNE. (2013). *Resultado Presidencial 2013*. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 dari [http://www.cne.gob.ve/resultado\\_presidencial\\_2013/r/1/reg\\_000000.html](http://www.cne.gob.ve/resultado_presidencial_2013/r/1/reg_000000.html).

- CSIS. (2019). *Juan Guaidó: Venezuela's Interim President*. Diakses pada 10 Maret 2020, dari <https://www.csis.org/analysis/juan-guaid%C3%B3-venezuelas-interim-president>.
- Dallas News. (2017). *U.S. liberals shouldn't be surprised by the failure of socialism in Venezuela*. Diakses pada 10 Maret 2020, dari <https://www.dallasnews.com/opinion/commentary/2017/05/10/u-s-liberals-shouldnt-be-surprised-by-the-failure-of-socialism-in-venezuela/>.
- Detikfinance. (2017). *Langkah Venezuela Keluar dari Krisis Ekonomi*. Diakses pada tanggal 02 Mei 2020 dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3643505/langkah-venezuela-keluar-dari-krisis-ekonomi>.
- Detiknews. (2020). *Pengiriman Tanker Minyak ke Venezuela Jadi Sumber Ketegangan Baru AS-Iran*. Diakses pada tanggal 25 September 2020 dari <https://news.detik.com/bbc-world/d-5025977/pengiriman-tanker-minyak-ke-venezuela-jadi-sumber-ketegangan-baru-as-iran>.
- Doing Business. (2016). *A World Bank Group Flagship Report. Doing Business 2016 Measuring Regulatory Quality and Efficiency*. Diakses pada tanggal 23 April 2020 dari <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf>.
- El Universo. (2015). *Pobreza en Venezuela Alcanzó Al 73% De Los Hogares*. Diakses pada tanggal 24 April 2020 dari <https://www.eluniverso.com/noticias/2015/11/20/nota/5251059/pobreza-venezuela-alcanzo-73-hogares>.
- Encyclopaedia Britannica. (2019). *Nicolás Maduro: President of Venezuela*. Diakses pada tanggal 13 April 2020 dari <https://www.britannica.com/biography/Nicolas-Maduro>.
- EOI Caracas, (2020). *India - Venezuela Relations*. Diakses pada tanggal 24 September 2020 dari <http://www.eoicaracas.gov.in/page/india-venezuela-relations/>.
- Forbes. (2018). *Does Venezuela's Oil-Backed 'Petro' Have The Power To Showcase National Cryptocurrencies?*. Diakses pada tanggal 04 Mei 2020 dari <https://www.forbes.com/sites/rogeraitken/2018/05/31/does-venezuelas-oil-backed-petro-have-the-power-to-showcase-national-cryptocurrencies/#31e671bf7b43>.
- Gugerli., K, M. (2020). *Taking Stock of Chinese and Russian Relations with Venezuela*. Diakses pada tanggal 27 September 2020 dari <https://www.venezuelablog.org/taking-stock-of-chinese-russian-relations-venezuela>.
- IMF DataMapper. (2020). *Inflation Rate, Average Consumer Prices*. Diakses pada 30 Januari 2020, dari <https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/VE?zoom=VEN&highlight=VEN>.

- Internasional Finance Corporation. (2013). *IFC Annual Report 2013*. Diakses pada tanggal 20 April 2020 dari [https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/61766bbb-8986-451b-9ca4-57a9466f4e81/AR2013\\_Full\\_Report.pdf?MOD=AJPERES&CVID=k5ruszm](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/61766bbb-8986-451b-9ca4-57a9466f4e81/AR2013_Full_Report.pdf?MOD=AJPERES&CVID=k5ruszm).
- Intituto Nacional de Estadistica. (2020). *Sociales: Pobreza*. Diakses pada tanggal 24 April 2020 dari [http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com\\_content&view=category&id=104&Itemid=45#](http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=45#).
- Investopedia. (2019). *How does the price of oil affect Venezuela's economy?*. Diakses pada 10 Januari 2020, dari <https://www.investopedia.com/ask/answers/032515/how-does-price-oil-affect-venezuelas-economy.asp>.
- JPNN. (2012). *Operasi Lagi, Chavez Pilih Tokoh Pengganti*. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 dari <https://www.jpnn.com/news/operasi-lagi-chavez-pilih-tokoh-pengganti?page=2>.
- Kompas. (2016). *Harga Hamburger Capai Rp 3,3 Juta, Kelas Menengah Jatuh Miskin*. Diakses pada tanggal 22 April 2020 dari <https://internasional.kompas.com/read/2016/05/23/14510341/harga.hamburger.capai.rp.3.3.juta.kela>.
- Kompas. (2016). *Ekonomi Jatuh, Hampir 90 Persen Warga Venezuela Tak Mampu Beli Bahan Pangan*. Diakses pada tanggal 02 Mei 2020 dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/06/21/112300226/ekonomi.jatuh.hampir.90.persen.warga.venezuela.tak.mampu.beli.bahan.pangan>.
- Labrador, Rocio Cara . (2019). *Venezuela: The Rise and Fall of a Petrostate*. Diakses pada 05 April 2020 dari <https://www.cfr.org/background/venezuela-crisis>.
- Lai, Kaia. (2006). *PetroCaribe : Chavez's Venturesome Solution to the Caribbean Oil Crisis*. Diakses pada tanggal 26 April 2020 dari <https://venezuelanalysis.com/analysis/1592>.
- Liputan6. (2018). *IMF: Inflasi Venezuela Capai 10 Juta Persen di 2019*. Diakses pada 6 Desember 2019, dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3662928/imf-inflasi-venezuela-capai-10-juta-persen-di-2019>.
- Lite Forex. (2020). *Apa itu redenominasi?*. Diakses pada tanggal 29 September 2020 dari <https://indo-liteforex.com/blog/for-investors/apa-itu-redenominasi/>.
- Lloyds Banks. (2020). *Venezuela: Economic and Political Overview*. Diakses pada tanggal 02 Mei 2020 dari <https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/venezuela/economical-context>.
- Reuters. (2019). *Venezuela Exodus Set To Top 5 Million As Long-Term Needs Grow, Officials Say*. Diakses pada 22 Januari 2020, dari <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-security-un/venezuela-exodus-set-to-top-5-million-as-long-term-needs-grow-officials-say-idUSKBN1X21MM>.

- RMOL. (2018). *Dubes Venezuela: Mereka Ingin Hentikan Revolusi Bolivarian*. Diakses pada tanggal 30 September 2020 dari <https://rmol.id/read/2018/01/28/336984/dubes-venezuela-mereka-ingin-hentikan-revolusi-bolivarian>.
- Sindonews. (2014). *Demonstran Venezuela Kembali Turun ke Jalan*. Diakses pada tanggal 16 April 2020 dari <https://international.sindonews.com/berita/840778/42/demonstran-venezuela-kembali-turun-ke-jalan>.
- Sprague, T. (2008). *Chavez Menasionalisasi Bank Venezuela: Sebuah Langkah Maju Bagi Revolusi Bolivarian*. Diakses pada tanggal 19 Desember 2020 dari <http://www.marxist.com/chavez-menasionalisasi-bank-venezuela.htm>.
- Statista. (2020). *Venezuela: Inflation rate (compared to the previous year)*. Diakses pada tanggal 04 Mei 2020 dari <https://www.statista.com/statistics/371895/inflation-rate-in-venezuela/>.
- Stratfor. (2014). *Venezuela's Pro-Government Activists Play a Role in Protest Violence*. Diakses pada tanggal 17 April 2020 dari <https://worldview.stratfor.com/article/venezuelas-pro-government-activists-play-role-protest-violence>.
- Stratfor. (2017). *Mexico Sees an Opportunity in Venezuela's Struggles*. Diakses pada tanggal 22 September 2020 dari <https://worldview.stratfor.com/article/mexico-sees-opportunity-venezuelas-struggles>.
- Treasury. (2020). *Resource Center: Venezuela-related Sanctions*. Diakses pada 10 Maret 2020, dari <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/venezuela.aspx>.
- Trading Economics. (2020). *Minyak Mentah*. Diakses pada 03 April 2020 dari <https://id.tradingeconomics.com/commodity/crude-oil>.
- Transparency Internasional. (2019). *Our Work in: Venezuela*. Diakses pada 9 April 2020 dari <https://www.transparency.org/country/VEN>.
- Trading Economics. (2020). *Venezuela - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Diakses pada tanggal 10 April 2020 dari <https://id.tradingeconomics.com/venezuela/government-budget>.
- Telesur. (2014). *Venezuela: New Legislation Ensures Access to Employment for Young People*. Diakses pada tanggal 03 Mei 2020 dari <http://www.telesurtv.net/english/news/Venezuela-New-Legislation-Ensures-Access-to-Employment-for-Young-People-20141009-0047.html>.
- The Conversation. (2019). *Menelaah Krisis Venezuela: Kisah Dua Presiden*. Diakses pada tanggal 19 April 2020 dari <https://theconversation.com/menelaah-krisis-venezuela-kisah-dua-presiden-111547>.



- The Conversation. (2019). *What caused hyperinflation in Venezuela: a rare blend of public ineptitude and private enterprise*. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 dari <https://theconversation.com/what-caused-hyperinflation-in-venezuela-a-rare-blend-of-public-ineptitude-and-private-enterprise-102483>.
- Trading Economics. (2020). *Venezuela - Tingkat Pengangguran* Diakses pada tanggal 04 Mei 2020 dari <https://id.tradingeconomics.com/venezuela/unemployment-rate>.
- Venezuela Analisis. (2014). *Venezuela: New Legislation Ensures Access to Employment for Young People*. Diakses pada tanggal 03 Mei 2020 dari <https://venezuelanalysis.com/news/10952>.
- WorldPopulationReview. (2019). *Oil Reserves By Country 2019*. Diakses pada tanggal 28 April 2020 dari <http://worldpopulationreview.com/countries/oilreserves-by-country/>.
- Wilpert, Gregory. (2019). *The Origins Of Venezuela's Economic Crisis*. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 dari <https://therealnews.com/the-origins-of-venezuelas-economic-crisis>.
- Viva. (2016). *Puluhan Ribu Rakyat Venezuela Lari ke Kolombia*. Diakses pada tanggal 25 April 2020 dari <https://www.viva.co.id/berita/dunia/797543-puluhan-ribu-rakyat-venezuela-lari-ke-kolombia>.
- WITS. (2018). *China Product Imports from Venezuela*. Diakses pada tanggal 23 September 2020 dari <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/Year/2018/TradeFlow/Import/Partner/VEN/Product/all-groups>.